

BAB IV PEMBAHASAN

Solidaritas dalam suatu kelompok atau masyarakat mempengaruhi proses integrasi nasional. Solidaritas yang tidak didasarkan pada primordialisme bisa melahirkan suatu kepentingan untuk mempertahankan kelompok. Maksudnya, solidaritas yang tidak didasarkan pada ikatan primordial / etnosentris dapat memperlancar integrasi didalam masyarakat.¹ Begitu pula sebaliknya, primordialisme yang amat kuat mengancam integrasi politik atau integrasi nasional. Hal itu timbul bilamana solidaritas primordial menjadi sarana untuk mempertajam perbedaan diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dalam konteks peranan integrasi nasional dari parpol, partai yang memperkuat atau mempertajam primordialisme akan memperlemah integrasi nasional.²

Primordialisme menjadi salah satu persoalan utama dalam politik Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan dicapai. Inti pokok dari masalah yang cukup mengemuka ialah perseteruan diantara Islam dan nasionalisme dalam rangka memperebutkan tempat di kehidupan politik nasional. Pangkal tolaknya adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya". Anak kalimat itu amat penting bagi kelompok Islam, sebab dengan begitu pelaksanaan syari'at Islam secara konstitusional lebih terbuka. Islam dan Pancasila (nasionalis) sebagai dasar negara pun diperdebatkan untuk pertama kalinya dalam sidang BPUPKI, Juni 1945. Perdebatan berikutnya terjadi di forum Konstituante.³

Pengaruh ideologi di Indonesia ditopang oleh pola politik aliran yang menghubungkan ideologi parpol dengan masyarakat. Masyarakat dengan aliran Islam menemukan saluran politiknya pada partai Islam, sementara masyarakat yang netral agama menemukan saluran politik mereka pada partai - partai nasionalis yang lebih terbuka. Melalui partai berbagai macam faham yang ada ditingkat nasional tersalurkan ke lapisan rakyat terbawah.⁴ Artinya, dengan parpol keanekaragaman faham menemukan penganutnya pada tingkat *grassroot*, sebagai lapisan terbesar dalam masyarakat Indonesia.

¹ Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, Hal. 271.

² Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989, hal. 110.

³ Ulasan mengenai hal ini dapat ditemui pada A. Syafii Maarif, "Islam dan Konstitusionalisme: Pengalaman Indonesia", *Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda*, Prisma, No. Ekstra, 1984 Tahun XIII, hal. 67.

⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.Cit.*, 1989 : 154-155.

Ideologisasi pun dilakukan oleh parpol terhadap masalah - masalah yang dipertikaikan, dimana rakyat dilibatkan ke dalam pertikaian tersebut. Akibatnya, perbedaan pada tingkat nasional kadangkala tidak dapat dilokalisasi di pusat karena parpol berusaha mendapatkan dukungan dari rakyat dengan memanfaatkan ikatan primordial. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa parpol berperan besar atau sangat penting bagi proses integrasi nasional. Karena menurut Ian Adams.⁵

“Politik pada umumnya merupakan upaya untuk mendamaikan pandangan - pandangan yang bertentangan agar sampai pada keputusan kolektif tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pandangan - pandangan yang saling bertentangan muncul karena beragam kepentingan. Setiap orang atau kelompok orang memiliki nilai - nilai yang berbeda dari orang lain. Konflik nilai merupakan sebuah masalah penting yang timbul tidak hanya karena akibat perselisihan seputar cara apa yang paling efektif dan efisien dalam melakukan sebuah tindakan. Tetapi juga cara mana yang benar.”

Sementara reformasi telah melahirkan sistem multi partai dengan beragam platform - ideologi politik. Suatu era yang tidak bisa menghindarkan diri dari kebutuhan untuk menggalang koalisi dengan partai lain guna menjamin stabilitas politik, khususnya di parlemen. Pangkal pokoknya, jika partai oposisi cukup kuat maka pemerintah berkuasa perlu suara dominan agar program mereka terlaksana, sehingga membutuhkan koalisi yang lebih “permanen”. Sementara pemilu sistem perwakilan berimbang dengan daftar terbuka pada pemilu 2004 dipandang kurang memenuhi preferensi publik, disamping tidak cukup mengurangi ketimpangan gender dan minoritas di parlemen, serta tidak dapat menciptakan suatu perwakilan pluralistik sederhana yang cocok dengan kebutuhan sistem Presidensial.⁶ Mekanisme ini juga menimbulkan ketegangan di internal parpol ketika menyusun daftar calon legislatif karena masih dimungkinkan adanya pertimbangan subyektif dari elit parpol. Suatu kondisi yang turut mendorong seseorang atau tokoh untuk mendirikan parpol baru.

Pengaruh ideologi politik dunia terhadap ideologi di tanah air sudah berlangsung sejak pra kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan lahirnya ideologi nasionalisme yang diprakasai oleh Dr. Soetomo dan teman-temannya melalui Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Feith membagi ideologi parpol Indonesia menjadi nasionalisme radikal,

⁵ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir*, (Ali Noerzaman), Yogyakarta : Penerbit QALAM, 1993, hal. 5-6.

⁶ Tim Peneliti CSIS, *Penyempurnaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*, Jakarta: USAID bekerjasama dengan DRSP dan CSIS, Agustus 2007, hal. iii.

tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokrat dan komunis.⁷ Akan tetapi, komunisme di Indonesia dapat dinyatakan sudah tidak ada pasca tragedi 1 Oktober 1965, terutama ketika Uni Soviet runtuh. Dengan demikian, fragmentasi merujuk pada pandangan Daneil Dakhidae yang membalik ideologi parpol era reformasi ke dalam agama, dalam hal ini Islam, Kristen / Katolik; kebangsaan, sosialisme, serta developmentalisme, ditambah dengan irisan antara paham kebangsaan, agama, dan sosialisme.⁸ Pengelompokan dikaitkan dengan pengaruh globalisme yang telah menjadi gejala umum di dunia. Catatan pentingnya ialah, bahwa partai-partai era reformasi mengambil pola yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada jaman pergerakan, dimana sebagian diantara mereka berawal dari gerakan tertutup, *clandestine*, kemudian menjadi gerakan terbuka seperti halnya PK Sejahtera.

Fragmentasi ideologi memang berkaitan dengan persoalan konsep tipe masyarakat yang hendak ditawarkan. Akan tetapi, ideologi juga berkenaan dengan aktivitas politik praktis. Karena itu, peran parpol dalam mentransformasikan ideologi selalu berhubungan dengan perbedaan - perbedaan fundamental tentang apa yang benar dan jenis masyarakat apa yang akan dibangun - hal semacam ini telah menjadi perhatian utama ideologi dari parpol. Karena itu - faktor sejarah, sifat-sifat hubungan didalam masyarakat, kemampuan berorganisasi elit, serta sikap terhadap ideologi - berpengaruh penting terhadap peranan parpol. Berdasarkan sejarahnya, ada 15 partai kontestan pemilu 1999 yang memiliki asal-usul sampai ke partai pra kemerdekaan dan tahun 1950-an, 8 partai diantaranya bisa dianggap mempunyai hubungan emosional dengan partai terdahulu - tetapi tidak punya mandat untuk melanjutkan partai-partai tersebut. Bahkan ada 18 partai 1999 yang mendasarkan diri pada agama masing - masing, baik yang mencantumkan langsung sebagai asas partai maupun berdasarkan konstituen utama mereka.

Bahkan fragmentasi ideologi masih terus berlangsung sampai kini, karena pemilu 2004 merupakan kelanjutan dari pemilu 1999 - ditambah dengan beberapa partai baru serta partai yang merevitalisasi diri. Termasuk dalam hal ini adalah Partai Demokrat (PD). Kehadiran PD dalam pemilu 2004 dengan jatidiri "Nasionalis Religius" telah memperkaya terminologi politik di tanah air - menyusul terminologi "Pembangunan" dari Partai Golkar (PG). Hal itu bisa dikatakan sebagai "terobosan" atau "idiom" baru dari

⁷ Feith, Herberth dan Lances Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.

⁸ Daniel Dhakidae, "Partai-partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-patahan Sejarah," dalam *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Kompas, 1999, hal. 36

para politisi Indonesia. Dikatakan idiom baru karena belum ada konsep komprehensif bahwa ia adalah ideologi. Apalagi dari aspek kepartaian – partai pengusung masih berbasis kebangsaan dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar pijak untuk bergerak dan berjuang. Artinya, terminologi pembangunan maupun nasionalis religius bisa dikategorikan sebagai partai kebangsaan dengan cita rasa baru. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan partai kelas dan aliran dari Daneil Dakhidae.⁹

IV.1 Ideologi

IV.1.1. PDI Perjuangan Pada Era Reformasi.

Sebagai partai nasionalis terbuka, keberadaan PDI Perjuangan ditopang oleh dua pilar utama, yaitu nasionalisme dalam wadah NKRI ditambah dengan faham / ketokohan Bung Karno. Keduanya terjalin erat - bersimbiosis dalam gerak laju eksistensi partai. Pasca Orde Baru, daya tarik PDI Perjuangan terletak pada Megawati sebagai simbol korban rezim otoritarianisme, sebagaimana dikemukakan ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan:¹⁰

“Munculnya Megawati di arena politik sebagai pemimpin partai yang besar – sempat menjadi Wakil Presiden dan Presiden! Itu semua merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa, Orde Baru itu bukan hanya membunuh fisik Soekarno tapi lebih daripada itu adalah ideologi dan citra Soekarno sebagai negarawan. Jadi kemenangan langsung Megawati pasca runtuhnya orde penindas haruslah dilihat sebagai bentuk pengembalian citra Soekarno oleh rakyat bahwa Soekarno bukan penjahat seperti yang dicitrakan oleh Orde Baru sebagai seorang terkutuk, pembunuh, pengkudeta, penjahat, diktator. Buktinya diterima lagi oleh rakyat dalam bentuk fisik anaknya. Jadi kehadiran Megawati merupakan lambang bahwa Bapak Bangsa itu tidak mati, lambang bahwa Bapak Bangsa itu menyatu dengan rakyat. Sedangkan bagi PDIP, dia adalah lambang penyatu PDIP - siapa yang memecah ia akan terlempar.”

Boleh saja orang berpendapat bahwa pandangan paternalistik yang terkesan sentimentil itu akibat dari pengalaman pribadi Soewarno sebagai salah satu korban rezim Orde Baru atau bahkan kepiawaian dia berargumentasi sebagai politisi. Dan bisa pula dinilai sebagai bentuk pragmatisme PDI Perjuangan untuk memperoleh dukungan. Akan tetapi kenyataan tidak dapat ditolak, bahwa mereka menjadi partai terbesar pada pemilu 1999 dan terbesar kedua di pemilu 2004. Adalah para Soekarnoisme sebagai simpatisan inti, sebagaimana halnya dengan parpol lain yang memiliki ikatan kultural dengan ormas -

⁹ *Ibid.*, Daniel Dhakidae, 1999 : 35.

¹⁰ Wawancara Soewarno, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, tanggal 13 September 2007 di Komplek Perumahan DPR RI - Kalibata, Jakarta.

ormas tertentu. Pendapat Soewarno ditegaskan kembali oleh Guruh Soekarnoputra yang ditemui secara terpisah.¹¹

“...realitas di umat PDIP dan juga umat komunitas nasionalis yang lain serta komunitas kebudayaan. Rasa kagum dan cintanya kepada Bung Karno memberikan penghormatan khusus. Kenyataan dari sebagian rakyat - masyarakat kita memiliki kepercayaan, supranatural, transedental bahwa Bung Karno patut sejajar dengan Wali. Oleh sebab itu, Ibu Mega ataupun saya sebagai anak Bung Karno merasakan bahwa rakyat lebih bisa menerima anak-anak Bung Karno dibanding yang lain kalau memimpin partai ini. Karena sebagian masyarakat masih berkeyakinan bahwa sejelek - jeleknya anak Bung Karno tidak akan terlalu membawa mudharat. Sehingga dengan sendirinya masyarakat masih sreg dengan kepemimpinan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Dengan begitu PDIP harus memenuhi aspirasi, benar - benar mengakomodir bukan hanya rasional tapi emosional, lahir - batinnya. Karena mereka masih mengharapakan lahirnya Bung Karno. Hal itu harus dipenuhi.”

Kenyataannya tidak mudah untuk mengakomodasi ideologi nasionalisme dan ketokohan / faham Bung Karno sebagai modal sosial partai. Para fungsionaris PDI Perjuangan pun sadar bahwa untuk dapat bertahan di masa yang akan datang tidak cukup bila hanya mengandalkan simbol Megawati atau paternalisme masyarakat. Kalaupun daya tarik itu lebih pada dukungan positif terhadap eksistensi partai, namun di era reformasi yang semakin terbuka tidak cukup jika hanya mengandalkan kesadaran paternalistik massa. Sebab variabel lain seperti organisasi dan kepemimpinan amat penting. Artinya, mereka pun sadar bahwa tidak bisa selamanya menggantungkan diri pada kesadaran paternalistik masyarakat dengan menempatkan Megawati sebagai simbol jika hendak menjadi partai modern.

Belajar dari pengalaman, begitulah kebijakan PDI Perjuangan pasca Kongres II. Dengan sejumlah terobosan yang dilakukan diharapkan mampu mengelola berbagai permasalahan. Salah satu faktor terpenting adalah perubahan orientasi ideologi. Perubahan orientasi dimaksud bisa ditelusuri dari Kongres V PDI atau Kongres I PDI Perjuangan di Bali pada tahun 1998, ketika itu Megawati menyatakan,¹²

“kalau dalam desakan gelombang globalisasi, perekonomian kita harus menerapkan sistem ekonomi pasar yang terbuka, maka sebagai bangsa yang percaya diri, seharusnya kita tidak perlu merasa cemas dan takut. Bila keterbukaan dan kehidupan demokrasi benar-benar telah kita menangkan, dan oleh karenanya rakyat dapat menjalankan fungsi kontrolnya, maka segala bentuk ketakutan terhadap praktik - praktik neokolonialisme lewat pintu pasar terbuka sebagaimana kekhawatiran banyak orang, rasanya tidak perlu kita jadikan permasalahan yang hanya akan membuat kita

¹¹ Wawancara Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, Guruh Soekarnoputra pada tanggal 06 Oktober 2007 di Jalan Sriwijaya Raya 26 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.

¹² Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan, Bandung*: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 172.

menjadi bangsa yang kerdil dan tak mampu menghadapi kenyataan. ... kita pasti mampu memenangkan hak - hak ekonomi rakyat kita, dengan tanpa harus melakukan distorsi terhadap prinsip ekonomi pasar itu sendiri.”

Namun bila keinsyafan itu dikonjungsikan dengan kesadaran PDI Perjuangan pasca Kongres II, nampak bahwa ia mengalami paradoks antara nasionalisme sebagai ideologi dengan keberpihakan partai terhadap liberalisme / mekanisme pasar. Keberpihakan mereka pada ekonomi pasar ternyata tidak mampu mendongkrak perolehan suara PDI Perjuangan di pemilu 2004 yang lalu. Bahkan bisa dikatakan Wong Cilik menghukum PDI Perjuangan atas kebijakan mereka - melalui pemilu legislatif dan presiden '2004.

Karena itu, pasca pemilu 2004 atau Kongres II di Bali tahun 2005, sejumlah terobosan dijalankan oleh PDI Perjuangan. Apabila sebelum pemilu ia menganjurkan agar Indonesia melakukan privatisasi terhadap Bank Indonesia, BPPN, dan berbagai BUMN, ternyata sejak Kongres II ia justru makin bersikap kritis terhadap globalisasi. Bahkan mainstream ideologi politiknya terus mengalami pergeseran ke “kiri”. Taruhlah misalnya kebijakan F PDIP di DPR RI, ia menyatakan bahwa tindakan dan sikap partai melalui “fraksi PDI Perjuangan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan yang bertumpu pada kedaulatan pangan, kedaulatan keuangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan pertahanan. Fraksi PDI Perjuangan memandang kedaulatan sebagai hal yang sangat prinsip, strategis dan ideologis.”¹³ Jadi secara ideologi, PDI Perjuangan mengalami metamorfosis dalam memandang masalah modal. Kesadaran ini bertolak dari perspektif bahwa era reformasi merupakan suatu era new kolonialisme – penjajahan bentuk baru. New kolonialisme menurut Soewarno merupakan suatu kondisi yang berlangsung sejak runtuhnya Orde Lama, karena sejak itulah prinsip - prinsip new kolonialisme dilaksanakan dengan nyata.

“Dimana prinsip-prinsip new kolonialisme amat nyata sejak berlangsungnya kekuasaan Orde Baru. Suatu pemerasan yang lebih dahsyat daripada kolonialisme Belanda. Apa itu new kolonialisme? *pertama*, menjadikan bangsa ini sebagai sumber bahan mentah; *kedua*, sebagai sumber tenaga murah; *ketiga*, tempat penanaman modal; *keempat*, sebagai pasar hasil industri - bahkan tidak hanya hasil industri, termasuk pertanian.”¹⁴

Memang tidak menutup kemungkinan bila pergeseran paradigma tersebut merupakan rangkaian strategi PDI Perjuangan menarik kembali para pendukungnya pada

¹³ “Laporan Kepada Rakyat Fraksi Oposisi DPR RI”, Kompas, 13 Agustus 2007.

¹⁴ Wawancara Soewarno, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, tanggal 13 September 2007 di Komplek Perumahan DPR RI - Kalibata, Jakarta.

pemilu 2009. Namun pergeseran platform partai dapat memberikan konsekuensi bagi kebijakan Indonesia, terutama dalam hal politik luar negeri bila ia berhasil memperoleh dukungan luas ditengah - tengah masyarakat dengan meraih kepemimpinan nasional. Artinya, pada konteks integrasi nasional, PDI Perjuangan menciptakan musuh bersama dari luar dengan menggeser paradigma.

Tetapi, bila mengikuti dinamika internal PDI Perjuangan, ternyata kebijakan itu lebih pada upaya membangun kohesi internal sambil memperkuat tujuan nasional dan cara pencapaiannya. Dalam hal mana ia berikhtiar untuk mewujudkan integrasi elit dan massa dengan menampilkan perilaku integratif sebagaimana dikemukakan oleh Myron Weiner. Pergeseran paradigma yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dapat dilihat dari tiga aspek: *Pertama*, Sebagai partai oposisi ia membutuhkan kerangka ideologi untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan yang berlangsung saat ini. Realitas mengenai hal ini tercermin dari pandangan Francis Fukuyama, “bahwa para pembangun awal di Eropa dan Amerika sedemikian rupa telah mempengaruhi pembentukan struktur ekonomi dunia untuk mendukung mereka dan menempatkan mereka yang datang kemudian pada posisi - posisi yang tergantung sebagai penyedia bahan – bahan mentah ... para pemimpin yang terpilih secara demokratis ini, bermula dari janji bahwa keterbelakangan bukan karena ketidakadilan yang inheren dalam kapitalisme, tetapi lebih pada karena tingkat kapitalisme yang tidak memadai yang dipraktekkan negara mereka dimasa lalu. Privatisasi dan perdagangan bebas telah menjadi semboyan-semboyan baru yang menggantikan nasionalisasi dan substitusi import.”¹⁵ *Kedua*, Sebagai partai yang sering dilanda “perpecahan”, ia membutuhkan gaya sentri petal yang lebih memadai. Terutama pada saat paternalisme sebagai daya kohesi mulai mengendor; *Ketiga*, Realitas bahwa Megawati sebagai anak biologis tidak secara otomatis diterima sebagai anak ideologis. Artinya, PDI Perjuangan tidak cukup bila hanya mengandalkan Megawati sebagai anak biologis untuk merebut dan mempertahankan para Soekarnois sebagai kekuatan inti dalam jangka panjang, dengan begitu ia perlu lebih kongkrit dalam praksis ideologi politik. Hal ini tergambar dari pengakuan Pramono Anung,¹⁶

“Bung Karno ini kan founding father – Bung Karno kan pembuat ideologi bangsa. Tentunya PDI Perjuangan merasa bahwa simbolisasi terhadap ajaran Bung Karno, kemudian juga hal - hal yang menjadi tuntunan Bung Karno merupakan pegangan

¹⁵ Francis Fukuyama, “*The End of History and The Last Man*”, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, (M.H. Amrullah), Yogyakarta: Qalam, 2004, hal. 72-73.

¹⁶ *Loc.Cit.*, Ir. Pramono Anung Wibowo, tanggal 25 September 2007.

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

partai didalam memberikan, menuju dan menatap masa depannya. Bagaimanapun Bung Karno bagi PDI Perjuangan adalah guru yang utama. Dengan demikian didalam berbagai persoalan PDI Perjuangan selalu bersinggungan dengan Bung Karno karena memang kami menjalankan ajaran Bung Karno.”

Sebagai partai yang akomodatif terhadap perbedaan, tidak akan begitu mudah bagi PDI Perjuangan dalam merealisasikan konsep ideologi politik Bung Karno. Terutama bila mencermati proses kehadirannya. Ia lahir melalui fusi yang secara ideologi saling bertolak belakang. Adapun parpol yang berfusi menjadi PDI secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam nasionalis, sosialis, dan kristen / katolik. Artinya, pemantapan ideologi bukan hanya penting tetapi mendesak. Kenyataan ini disadari oleh Soewarno selaku ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi,¹⁷

“... PDIP bertekad dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Artinya, PDIP adalah penerus ajaran Bung Karno. Walaupun eksistensinya sangat tergantung dengan proses, sebab bila yang dominan adalah yang anti, berarti PDIP gagal. Dengan begitu PDIP hanya akan besar sepanjang dipimpin oleh Megawati, karena image Megawati adalah image Soekarno. Sebab, jikalau PDIP dibawah pimpinan Megawati tidak dapat menggunakan kesempatan sebagai partai yang memiliki ideologi dan kader maka setelah Megawati mundur - PDIP akan tutup. Kuncinya sekarang adalah pada membangun ideologi kader. Dengan begitu, PDIP akan mengalami peningkatan kualitatif jika berhasil dalam ideologi dan kaderisasi tetapi jika gagal PDIP tidak akan berusia 20 tahun – menjadi partai gurem karena kalah dengan partai baru yang aspirasinya sesuai dengan realitas Indonesia. Berbicara realitas Indonesia tidak akan mungkin mengingkari ajaran Soekarno.”

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dinamika mengenai platform partai masih terus mengalami pergulatan diantara unsur - unsur fusi yang ada didalamnya. Walaupun para petinggi partai menyatakan bahwa unsur fusi pasca runtuhnya Orde Baru sudah tidak ada, namun pada tataran praksis keseharian dampaknya masih amat terasa. Unsur fusi idealnya memang sudah tidak ada kata Soewarno, akan tetapi beberapa orang yang masih ingin eksis dapat mengatasnamakan keterwakilan unsur fusi.¹⁸

“... Pasca Kongres Semarang seharusnya unsur fusi hilang. Tapi beberapa masih ingin tetap eksis di PDIP, padahal beberapa partai yang berfusi telah mendirikan parpol baru. Untuk itu, kalau terjadi proses demokratisasi yang sehat dari bawah, mereka tahu akan habis. Jika tidak, mereka harus menekan demokrasi. Dan itulah yang terjadi sekarang.”

¹⁷ *Loc. Cit.*, Soewarno, tanggal 13 September 2007.

¹⁸ *Ibid.*, Soewarno, tanggal 13 September 2007.

Pengalaman yang menimpa PNI dimasa lampau bisa kembali terulang di PDI Perjuangan bila begitu.¹⁹ Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa PNI sampai pada awal Orde Baru terus mengalami pergulatan ideologi - setidaknya belum memperoleh kesepakatan mengenai Marhaenisme sebagai inti dasar dari nilai yang hendak mereka kembangkan. Walaupun kemungkinan itu dibantah oleh Pramono Anung dengan menyatakan kalau perpecahan yang membawa dampak signifikan bagi eksistensi partai sudah tidak terjadi lagi. Kemajuan dan pendewasaan politik telah dialami dengan cukup pesat oleh PDI Perjuangan.

“... PDI atau PDI Perjuangan adalah partai hasil fusi yang dipaksakan oleh Orde Baru karena hegemoni pada waktu itu hanya memberikan peluang kepada Golkar untuk selalu berkuasa, sedangkan partai-partai lain kan dipaksakan. Dimana kemudian P3 pecah menjadi banyak partai yang semuanya berasas Islam, ... Demikian juga dengan partai nasionalis yang ada pada PDI Perjuangan. Tetapi perbedaannya adalah fragmentasi yang pada waktu itu afiliasinya ke P3 menjadi lebih banyak partai - partai Islam dengan kekuatan yang seimbang, sedangkan partai nasionalis yang afiliasinya ke PDI pada waktu itu sekarang ini tinggal PDI Perjuangan yang dominan jika dibandingkan yang lain. ... Namun sejak kurun 2004, PDI Perjuangan mengalami proses pendewasaan yang luar biasa karena didalamnya dibangun system building - aturan main kepartaian. Nah, sejak system building itu terbangun maka konflik itu praktis tidak ada. Dimana hampir tidak pernah ada lagi yang namanya demo didepan kantor DPP jika dibandingkan dengan dulu yang hampir setiap hari. Dan itulah yang menjadi kekuatan PDI Perjuangan saat ini.”²⁰

Namun demikian, meskipun berusaha membangun sistem kepartaian modern yang bertumpu pada program sebagai implementasi dari platform partai. Ternyata PDI Perjuangan masih sangat mengandalkan sosok Megawati. Megawati dipandang sebagai figur yang belum ada tandingannya bila dibandingkan dengan figur lain – ia memegang tiga peran sekaligus. Tiga keunggulan yang dimiliki oleh Megawati menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo,²¹ “Megawati adalah pemersatu, Megawati adalah leader dan Megawati adalah kekuatan PDI Perjuangan tetapi sekaligus dalam diri Megawati ada kesadaran yang kuat untuk membangun system building partai ini sekarang.”

Artinya, ketokohan Megawati sebagai anak sang Proklamator memang bukan perkara kecil bagi PDI Perjuangan. Kenyataan ini terungkap menjelang Kongres II, terutama ketika gugatan disuarakan dengan nyaring oleh sejumlah elit partai, misalnya

¹⁹ Lihat, J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi : Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

²⁰ *Loc. Cit.*, Ir. Pramono Anung, tanggal 25 September 2007. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan P3 adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

²¹ *Loc.Cit.*, Ir. Parmono Anung, tanggal 25 September 2007.

saja gugatan atas formatur tunggal, pembatasan kekuasaan ketua umum dan tuntutan transparansi dalam keputusan partai sebagai dasar argumentasi yang pada akhirnya melahirkan fragmentasi internal. Tidak ketinggalan pula masalah regenerasi. Persoalan regenerasi menjadi salah satu topik yang banyak disorot menjelang Kongres II di Bali.

IV.1.2. Ideologi PK Sejahtera Dari Aspek Integrasi Nasional

Dalam konteks hubungan negara dengan Islam, Ibnu Taimiyah melalui konsep *Nomokrasinya* berpendapat bahwa perlu dibentuk pemerintahan yang berdasarkan pada hukum Tuhan untuk menciptakan negara yang bersih dan kuat.²² Karena hanya hukum Tuhanlah yang dapat menjamin kemaslahatan dan ketentraman bagi warga negara. Dengan begitu *Al-Din* dalam Al-qur'an mengandung konsep bidimensional yang mencakup dua aspek kehidupan manusia sekaligus, yaitu aspek religius – spiritual dan aspek kemasyarakatan yang bertumpu pada ajaran Tauhid. Sedangkan gerakan fundamentalisme Islam menurut Jalaluddin Rakhmat diartikan untuk menunjukkan empat hal - gerakan tajdid; reaksi pada kaum modernis; reaksi pada westernisasi; dan keyakinan terhadap Islam sebagai ideologi alternatif.²³

Paradigma integralistik memandang bahwa agama dan negara menyatu. Klaim integralistik Islam didasarkan pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Para penganut paradigma ini berkeyakinan bahwa Islam bukanlah semata - mata agama dalam pengertian Barat, sekuler. Agama bukan hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bahkan bagi mereka, Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan negara. Partai Keadilan (PK) sebelum berubah menjadi PK Sejahtera dapat dimasukkan kedalam katagori paradigma integralistik. Hal ini bisa ditemui dari materi training orientasi PK,

“Islam bukan hanya ritual-ritual yang kita lakukan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah SWT. Islam jauh lebih luas dari sekedar ritual. Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap dan paripurna serta bersifat universal. Ia mengatur kehidupan kita sejak bangun dan tidur sampai kita tidur kembali. Ia menata kehidupan kita sebagai individu dan masyarakat. Menata ibadah kita seperti ia menata kehidupan sosial budaya. Ia

²² Ibnu Taimiyah, *Ibnu Taimiyah: Hidup dan Pikiran-pikirannya*, (Ahmadie Thaha), Malaysia: Panamas Sdn.Bhd. 1984, hal 26.

²³ Jalaluddin Rakhmat, “Fundamentalisme Islam: Mitos dan Realitas,” Prisma, *Op.Cit.*, 1984 : 79.

adalah al-qura'an dan pedang, masjid dan pasar, agama dan negara, iman dan ilmu, ibadah dan seni."²⁴

Kemudian ditegaskan kembali dalam jati diri PK,

"Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang - undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Keuniversalan inti dan pokok - pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara dan masyarakat."²⁵

Artinya, pada titik paling ekstrim - setiap kebijakan atau sistem yang tidak berdasarkan Islam sebagai wahyu Allah SWT tidak perlu ditiru dan tidak perlu diikuti. Dengan demikian sistem Barat tentang demokrasi, partai politik, pemilu dan perangkat - perangkat negara modern lainnya patut dipertanyakan karena semuanya bertolak belakang dengan Islam. Maksudnya, sistem Barat bisa menjadi bagian dari sekulerisasi yang sengaja dipropagandakan untuk melemahkan Islam.²⁶ Jika demikian adanya, maka integrasi berdasarkan yurisdiksi negara nasional tidak berlaku - bisa dikatakan anti nasionalisme karena paradigma yang dibangun adalah kosmopolitan. Akan tetapi PK memiliki mainstreams tersendiri tentang demokrasi dengan fundamen syariat, sebagaimana dinyatakan dalam jati diri partai:

"Atas dasar kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kesamaan asal usul dan memiliki kewajiban yang sama dalam upaya memakmurkan bumi, maka kapasitas tanggung jawabnya sebagai Khalifatullah harus diakui. Sedangkan klaim kekhalifahan tergantung kepada sejauh mana manusia konsisten menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Salah satu nilai universal demokrasi adalah bentuk pengakuan kepada manusia dalam tanggung jawabnya itu."²⁷

Jadi PK mengakui demokrasi sebagai suatu prosedur yang sesuai dengan fitrah manusia dan menetapkan Islam sebagai dasar partai serta bercita - cita hendak menegakkan ajaran Islam didalam bermasyarakat dan bernegara. Paradigma PK Sejahtera tentang demokrasi ternyata sejalan dengan mayoritas umat Islam di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia terhadap pemilih Muslim pada Oktober 2006 menunjukkan bahwa 82% setuju dengan demokrasi sebagai sistem politik terbaik

²⁴ Tim Kaderisasi Partai Keadilan, *Syumuliyatul Islam*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatun, Cetakan I, 2002, hal. 25-26.

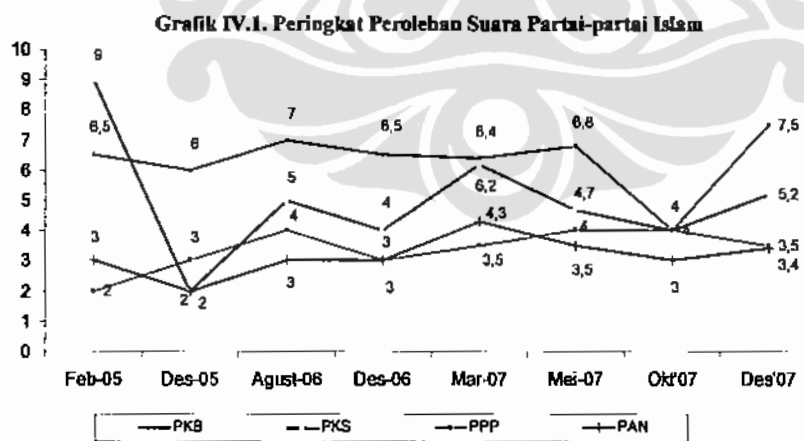
²⁵ DPP Partai Keadilan, *Jatidiri Partai Keadilan*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatun, 2002, hal. 20.

²⁶ Nandang Burhanudin, *Perjuangan Penerapan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*, Tesis Magister, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003, hal 40.

²⁷ Nur Mahmudi Ismail, "Jatidiri Partai Keadilan", *Memilih Partai Islam : Visi, Misi, dan Persepsi*, Sahar L. Hasan, et.al (ed), Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hal. 46.

bagi Indonesia dan hanya 5% yang tidak setuju, sedangkan 13% lainnya mengatakan tidak tahu. Ada 8,4% yang menganggap bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam dan 78,4% memandang demokrasi sejalan dengan Islam, sedangkan 13,2% menyatakan tidak tahu. Bahkan menurut temuan LSI, ada 83% yang memandang bahwa Pancasila dan UUD '45 (Undang – undang Dasar 1945) merupakan paham yang paling cocok untuk Indonesia, dan 85% menganggap Pancasila dan UUD '45 sesuai dengan Islam. Ternyata hanya 5,3% yang menghendaki agar Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu paham diganti, dan cuma 3,5% yang menganggap Pancasila dan UUD '45 bertentangan dengan Islam. Sedangkan 11,7% menyatakan tidak tahu apakah Pancasila dan UUD '45 merupakan paham yang cocok dengan Indonesia; 11,5% menyatakan tidak tahu apakah Pancasila dan UUD 1945 bertentangan atau tidak dengan Islam.

Memang PK Sejahtera bukan satu - satunya parpol yang menetapkan Islam sebagai dasar partai. Banyak parpol di era reformasi yang menetapkan Islam sebagai ideologi atau asas partai. Meskipun demikian tidak berarti bahwa penjabaran diantara mereka akan sama - terutama bila dikaitkan dengan pandangan dan kebijakan praksis dari masing - masing parpol. Bahkan dalam konteks perebutan pengaruh bisa dikatakan terjadi rivalitas. Kenyataan itu tampak dari hasil survey yang dilakukan oleh LSI dan Indo Barometer sepanjang bulan April 2004 sampai Maret 2007, sebagaimana ditunjukkan pada grafik IV.1. berikut ini.²⁸



Oleh sebab itu, sebelum mengkaji konteks kebijakan praksis, akan lebih baik jika terlebih dahulu mengkaji aspek fundamen yang membedakan PK Sejahtera dengan partai Islam lain. Karena mengkaji kebijakan praksis tanpa mengkonjungsikan dengan ideologi

²⁸ Sumber : data pada Februari 2005 sampai Oktober 2007 diperoleh dari hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI), Media Indonesia, 19 April 2007; data pada bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 diperoleh dari hasil survey Indo Barometer. Lihat juga, Republika, 14 Desember 2007. Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

yang menjadi dasar pijakkan mereka akan menyulitkan pembahasan. Misalnya saja tentang persatuan umat muslim - *ukhuwah Islamiyah*, PK memiliki pandangan bahwa:

“... Persatuan umat adalah tonggak terpenting bagi kesatuan bangsa. Ia merupakan dambaan segenap umat Muslimin ... Untuk mewujudkan cita - cita tersebut Partai Keadilan meyakini bahwa pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara adalah jalan yang harus ditempuh bagi siapa pun yang merindukan persatuan. Persatuan umat yang hakiki harus dibangun di atas landasan pemahaman dan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri.”²⁹

Pada konteks ini ia memandang bahwa pribadi dan negara merupakan sarana bagi tercapainya penyatuan umat berdasarkan ajaran Islam secara keseluruhan (*kaffah*). Kerjasama internasional pun didorong bagi terciptanya suatu tata dunia baru dimana misi *rahmatan lil-alamin* dari Islam dapat diwujudkan secara konkrit. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan PK Sejahtera. Diantara prinsip kebijakan yang paling penting dalam aspek integrasi nasional adalah *Al - Syar'iyah* (konstitusional); *Al - Istiqomah* (komit dan konsisten); *Al - Tadarruj wa Al - Tawazun* (bertahap, seimbang dan proporsional); dan *Al - 'Alamiyah* (bagian dari dakwah global).³⁰

Maksud dari *Al-Syar'iyah* adalah, “menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan dan komitmen kepadanya sebagai konsekuensi keimanan. Komitmen itu terwujud dalam bentuk keberpihakan kepada *Al-haq* dalam seluruh aspek kehidupan.” Hal ini sangat terkait dengan *Al-Istiqomah* yaitu, “berpegang teguh atau konsisten pada ajaran dan aturan Islam sebagai prinsip dasar seorang Muslim. Konsekuensinya, seluruh kebijakan, program dan langkah - langkah operasional partai harus konsisten berada dalam rel ajaran Islam.” Dari kedua prinsip tersebut dapat dipahami bila ada sebagian pandangan yang menyatakan bahwa PK Sejahtera merupakan Islam fundamentalis karena upaya untuk memformalkan syariat Islam menjadi konstitusi merupakan gerakan konstitusionalisme yang menjadi bagian dari *istiqomah*. Oleh sebab itu, peran PK Sejahtera sebagai parpol selalu koheren dengan jati dirinya sebagai partai dakwah dengan tidak mengabaikan aspek strategi, seperti yang dikemukakan Mahfudz Sidiq selaku Ketua F-PKS di DPR RI dan Ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PKS,³¹

“... kami memandang bahwa kami baru berbicara aturan atau yang lebih mudah disebut dengan syariat kalau memang masyarakat memiliki kesadaran dan kebutuhan

²⁹ *Ibid*, Nur Mahmudi Ismail, 1998 : 54.

³⁰ Masyud, *Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, Tesis Magister, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2007, hal. 62-65.

³¹ Wawancara Mahfudz Sidiq, Ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PK Sejahtera, tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI Lt. 3 Jakarta.

akan aturan itu. Sehingga, agenda-agenda PKS terkait dengan penetapan syariat, penegakan syariat, itu akan sejalan dan akan selalu sejalan dengan tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat karena masyarakat tidak bisa dipaksakan. Ketika mereka butuh satu aturan dan itu berangkat dari kesadaran atau keinginan mereka, maka apapun aturan itu, ia akan efektif. Apapun nama aturan itu, mau namanya syariat, mau namanya bukan syariat, ia akan efektif.”

Pandangan tersebut bertolak dari suatu kesadaran bahwa untuk melakukan gerakan konstitusionalisme, termasuk dalam mengubah konstitusi dasar akan menghadapi resistensi.³² Gerakan konstitusionalisme hanya akan terlaksana apabila dapat melampaui dua syarat. *Pertama*, masyarakat sudah memiliki kematangan, sehingga resistensinya lemah; *Kedua*, muslimin harus memiliki *grand of power*, artinya secara politis *defacto* harus memiliki kekuatan diatas kaum yang resisten. Jadi tidak mengandalkan mayoritas semata. Bagaimanapun mayoritas tidak bisa dijadikan jaminan bahwa secara *defacto* yang mayoritas itu mampu menundukkan para resistenis, walaupun minoritas.³³

Berangkat dari kedua prasyarat tersebut diatas, maka prasangka terhadap penerapan konstitusionalisme belum cukup alasan. Jadi PK Sejahtera masih bisa berperan sebagai medium pengintegrasikan yang menjamin stabilitas politik dalam jangka panjang. Bagaimanapun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam – ditambah dengan strategi dakwah yang dilakukan secara damai. Apalagi menurut Mahfudz Sidiq,³⁴

“PKS secara politik menilai bahwa wujud negara kesatuan ini sesuatu yang harus dipertahankan, harus diperjuangkan karena inilah satu entitas besar, bukan hanya entitas suatu bangsa yang bernama Indonesia tapi juga satu entitas besar yang bernama umat Islam ada didalam rumah besar yang bernama NKRI.”

Lebih daripada itu, menurut ketua Bidang Pembinaan Kader DPP PK Sejahtera, Ahmad Zainuddin:³⁵ “PK Sejahtera lebih memilih Piagam Madinah daripada Piagam Jakarta.” Jika demikian, mereka mengalami pergeseran paradigma dari awal kehadirannya – dari formalisme Islam menjadi lebih substantif. Bahkan menjadi lebih akomodatif terhadap permasalahan pluralitas yang ada di Indonesia – keindonesiaan. Artinya, strategi dakwah PK Sejahtera lebih “ke tengah”, sebagaimana diungkapkan ketua Fraksi PKS DPR RI.

³² Fraksi PKS keberatan dengan Pasal 9 ayat 3 UUParpol yang berbunyi “Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana termaktub dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Kompas, 7 Desember 2007.

³³ H. Mutammimul Ula, *Perspektif Penerapan Syariat Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatun, 2002, hal. 29.

³⁴ *Loc. Cit.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007.

³⁵ Wawancara Ahmad Zainuddin, Ketua Bidang Pembinaan Kader DPP PK Sejahtera, tanggal 20 Agustus 2007 di kantor DPP PKS - Jakarta.

“... kami terus mengembangkan sebuah pemikiran politik dikalangan internal – jajaran pengurus, jajaran kader tentang faham - faham politik semacam apa yang dianut oleh PKS, yaitu inklusifitas, pluralitas. Dan itu diharapkan menjadi suatu frame berfikir dan frame bertindak bagi para kader, para anggota partai, sehingga tidak terjadi paradoks antara fikiran, antara tindakan dan aturan-aturan yang ada.”³⁶

Ahmad Zainuddin menambahkan bahwa, “hal terpenting dari misi dakwah PKS adalah Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam bukan Islam yang menimbulkan perpecahan – disintegritas, bukan Islam yang menimbulkan kekerasan.” Oleh sebab itu, PK Sejahtera dapat bekerjasama dengan partai - partai Islam maupun non Islam. Ahmad Zainuddin menegaskan, bahwa dengan partai Islam ataupun nasionalis kami bisa duduk bersama untuk saling memahami kira - kira sisi apa yang bisa dikerjasamakan meskipun ada sisi yang berbeda. Artinya, walaupun ada sesuatu yang bisa dikerjasamakan namun tetap tidak menutup peluang bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dikerjasamakan. Mahfudz Sidiq menjelaskan bahwa,³⁷

“Dalam konteks komunikasi - kerjasama dengan partai Islam, kami bekerja di dua level : Pertama di level ideologis, ada agenda-agenda keumatan yang lebih spesifik, yang itu saya kira kerangka berfikir - kerangka kepentingannya relatif banyak persamaan antara PKS dengan partai-partai Islam yang lain. ... Kedua, komunikasi dan kerjasama pada level taktis - politis, kami berbicara dengan konsep - konsep dan program - program riil yang dibutuhkan oleh masyarakat, tanpa peduli siapa mereka, tanpa peduli bagaimana mereka. Karena ini satu hal yang sifatnya universal dan ini sangat terbuka untuk kami komunikasikan. Paling tidak, karena secara ideologis kami punya banyak kesamaan maka secara taktis pun kami berharap juga akan lebih memiliki banyak kesamaan. Tapi tentu saja PKS, termasuk yang di DPR ini sangat terbuka untuk berkomunikasi - kerjasama dengan partai - partai atau fraksi lain yang tidak berbasis agama seperti Partai Golkar, PDIP, bahkan berbeda agama sekalipun, dalam tataran politis dan taktis tadi. Memang kalau sudah menyentuh aspek atau level ideologis, tidak terhindarkan ada perbedaan - perbedaan yang tajam.”

Dengan orientasi ideologi yang lebih inklusif bukan berarti tanpa keuntungan politik bagi PK Sejahtera, sebagaimana terungkap dari pengakuan Mahfudz Sidiq,

“Sejauh ini memang ada hasil - hasil yang positif, misalnya ruang interaksi dan penerimaan kepada PKS semakin luas. Bahkan kasus paling mutakhir misalnya dalam PILKADA DKI Jakarta, kalau dilihat dari segmen pemilih non Muslim, berdasarkan hasil survey ternyata 70% pemilih non Muslim memilih calon yang diusung PKS. Begitupun PILKADA di Papua, bahkan kami memiliki dua Anggota Legislatif Kab / Kota yang asli orang Papua dan non Muslim.”³⁸

³⁶ *Loc. Cit.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007.

³⁷ *Ibid.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007.

³⁸ *Ibid.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007.

Disamping itu, pada konteks konfigurasi Islam politik di tanah air ternyata kehadiran PK Sejahtera memberi nuansa baru.³⁹ Hal ini pun disadari oleh PK Sejahtera, bahwa diantara partai Islam terjadi perbedaan metode untuk membangun bangsa - umat. Ada beberapa partai Islam yang menggunakan ormas, seperti PAN dengan Muhammadiyah, PBB dengan Dewan Dakwah Islam (DDI), PKB dengan NU (Nahdlatul Ulama) sebagai basis konstituen. Sementara PK Sejahtera tidak ada latar belakang dan atau dibelakang ormas tertentu. Padahal hubungan kultural antara partai Islam dengan ormas Islam memiliki kekuatan tersendiri. Tidak mengherankan apabila PK Sejahtera menggunakan "Brain Market" sebagai partai bersih / pro reformasi, hal mana ditambah dengan keunggulannya sebagai partai kader yang berorientasi pada pemberdayaan anggota ketika hendak menghadapi pemilu 2004 - hasilnya pun signifikan.

Tantangan terhadap peran PK Sejahtera untuk mewujudkan integrasi nasional lahir dari platform *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (bertahap, seimbang dan proporsional). Maksudnya adalah, "pertumbuhan dan perkembangan gerakan dakwah partai harus dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagad raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan seimbang." Konsekuensi dari prinsip ini akan menjadikan PK Sejahtera dapat berkompromi dengan realitas politik pada tahap tertentu untuk bersaing memperebutkan pengaruh dengan partai Islam lain yang sudah eksis dan juga akomodatif. Doktrin *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* merupakan salah satu bentuk ikhtiar PK Sejahtera dalam upaya mengapai tujuan, sekaligus tetap menjamin keberlangsungan sistem politik, paling tidak stabilitas politik. Terutama bila ia memperoleh dukungan mayoritas.

Keraguan mengenai komitmen PK Sejahtera terhadap integrasi nasional datang dari prinsip *Al-'Alamiyah* (bagian dari dakwah global), "dimana gerakan dakwah, baik tujuan maupun sasaran yang akan dicapai bersifat global sejalan dengan universalitas Islam. Ia merupakan aktivitas yang tidak mengenal batas entitas, negara atau daerah tertentu. Adalah suatu keniscayaan jika setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan prinsip diatas, tentunya dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi masing-masing wilayah." Peran PK Sejahtera pada konteks ini sangat tergantung dengan kondisi politik global yang saling kait - mengkait dengan politik nasional. Artinya, jika PK Sejahtera dihadapkan

³⁹ Khoiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 180-181.

pada pilihan untuk mengutamakan keselamatan negara atau Islam secara keseluruhan, jawabannya sudah dapat ditebak. Ia akan selalu berusaha menselaraskan kepentingan negara dengan kepentingan Islam, paling tidak akan berupaya untuk memadukan nilai - nilai nasionalisme dengan kosmopolitan. Hal ini tercermin dalam tujuan partai di Pasal 5 Anggaran Dasar yang menyebutkan:

“Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da’wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah Subhanahu Wata’ala, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Akan tetapi didalam usaha partai disebutkan pula bahwa:

”Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal - hal sebagai berikut : Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman; Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami; Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang; Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam; Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.”⁴⁰

Hal ini dipertegas dengan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga tentang sasaran:⁴¹

”Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai - nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak - hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini”

Mahfudz Sidiq menyatakan bahwa dalam pemikiran dan konsepnya, PK Sejahtera tidak mempersoalkan tentang format dan nama dari satu institusi yang bernama negara. Sebab menurut dia, Islam sendiri tidak pernah mengatur secara definitif tentang bentuk, format dan nama negara. Jadi hanya pilihan - pilihan yang disesuaikan dengan kondisi sosiologis, politis masyarakat yang bisa berbeda dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dan dari tempat ke tempat lain. Karena yang diinginkan oleh PK Sejahtera adalah terwujudnya satu model masyarakat dengan tata nilai dan tata perilaku yang semakin dekat dengan ajaran - ajaran Islam. Artinya, mereka lebih menekankan pada aspek perilaku Islami dari anggota masyarakat daripada sebuah negara. Tegasnya, PK Sejahtera tidak mempersoalkan eksistensi dan keutuhan dari negara Indonesia (integrasi wilayah).

⁴⁰ Pasal 6 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, <http://www.pk-sejahtera.org/2006/main.php?op=isi&id=112>; Sedangkan garis bawah dari penulis.

⁴¹ Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, <http://www.pk-sejahtera.org/2006/main.php?op=isi&id=113>

Hal senada dikemukakan oleh Untung Wahono selaku ketua Bidang POLHUKAM DPP PK Sejahtera,

“Ada beberapa pengertian mengenai NKRI itu final, pertama mengenai bentuknya, ia sebagai negara kesatuan. Jadi bentuknya, bentuk kesatuannya itu yang final. Kalau itu, menurut saya untuk sementara bisa seperti itu. Karena bentuk negara kesatuan maupun serikat, itu pilihan - pilihan saja. Untuk suatu negara yang sangat besar, mungkin serikat lebih bagus, Untuk negara sangat homogen sampai sangat heterogen, negara serikat mungkin bagus. Tapi untuk negara homogen, tidak terlalu besar, mungkin kesatuan lebih cocok. Masalahnya Indonesia ini kan sebuah negara yang boleh jadi tidak statis, dulu Indonesia tidak pakai Irian terus ada Irian, kemudian, Indonesia ngak pakai Timor - timur terus ada Timor - timur, jadi mengenai luasannya itu tidak statis. Memang luasan itu sendiri nantinya juga menentukan model - modelnya. Memang UUD'45 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu final, final dalam arti, sampai saat sekrang ini belum kita lihat sesuatu yang dibutuhkan untuk berubah ya, kami bisa terima. Baik itu merupakan bentuk negaranya adalah kesatuan maupun luasan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Siapa tahu misalkan suatu saat misalkan Brunai mau bergabung, khan boleh jadi, khan berkembang wilayahnya. Suatu saat Timor - timur mau bergabung lagi dengan Indonesia, boleh jadi. Suatu saat Malaysia ingin juga bergabung dengan Indonesia dan itu diperlukan suatu negara serikat misalkan atau federasi, itu bukan suatu hal yang mustahil, bisa setiap saat. Tapi yang paling penting, Indonesia sebagai suatu basis negara yang kami akui ini tetap.”⁴²

Prasangka pun timbul, bahwa PK Sejahtera hanya akan berkompromi dengan realitas politik selama situasi belum mendukung penerapan syariat secara penuh, tetapi bila kekuasaan telah diraih ia akan memaksakan orientasi ideologi integralistiknya. Taruhlah misalnya Islam yang *rahmatan lil alamin* - agar ia menjadi kongkrit tentu harus dilakukan secara kaffah (menyeluruh). Dengan begitu maka tegaknya syariat Islam menjadi keniscayaan. Maksudnya, penerapan syariat akan diikhtiarkan sesuai dengan situasi politik – aspek lokalitas pada fase tertentu saja. Prejudice sah - sah saja, apalagi bila mencermati pendapat Nur Mahmudi, sebelum PK berubah menjadi PK Sejahtera :

“Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan. Sedangkan partai merupakan salah satu sarana dakwah Islam yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam di bumi. Bagi para kader partai berjuang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan umumnya...”⁴³

Demikian halnya dalam Anggaran Dasar yang berbunyi,⁴⁴

⁴² Wawancara Ir. Untung Wahono, Msi, Ketua Bidang POLHUKAM DPP PKS , tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI It 4 - Jakarta

⁴³ *Op.Cit.*, Nur Mahmudi Ismail, 1998 : 43.

⁴⁴ Pasal 25 ayat 1 dan 2, Anggaran Dasar PK Sejahtera.

1. Ummat Islam Indonesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia.
2. Untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.

Karena dari keinsyafatn ini dapat dikonvergensi bahwa mereka memposisikan negara sebagai kekuatan otonom yang memiliki peran sentral untuk membangun masyarakatnya.

Dengan demikian peranan PK Sejahtera terhadap integrasi nasional mengalami paradoks antara idealisme perjuangan dengan pragmatisme politik. Suatu realitas yang terungkap dari pandangan Myron Weiner dan Joseph La Palombara bahwa kebanyakan parpol dinegara baru seringkali menghadapi dua unsur integrasi nasional, ialah masalah penguasaan atas wilayah negara dan masalah loyalitas - loyalitas subyektif. Artinya, permasalahan paradigma dari PK Sejahtera tidak bisa serta - merta ditarik secara ekstrim, sebab mencuatnya perbedaan platform bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain masalah pragmatisme untuk mengikat para pendukung loyalis ternyata ada juga unsur psikologis seiring dengan euforia politik setelah Orde Baru melakukan de - ideologisasi melalui penyeragaman asas dan politik massa mengambang. Sebab Orde Baru secara praktis telah memporak - porandakan konstituen agama. Asas tunggal membawa implikasi negatif bagi eksistensi partai-partai, terutama partai berbasis primordialisme. Selain kehilangan jati diri – dengan asas tunggal parpol kehilangan ciri khasnya, sehingga mengalami keterputusan secara emosional dari grasroot.

IV.2. Kebijakan Partai Politik Era Reformasi Dari Perspektif Integrasi Nasional.

Parpol merupakan organisasi politik yang menjadi barometer demokrasi. Dalam praktek demokrasi liberal yang diterapkan dewasa ini, tidak mungkin ada demokrasi tanpa parpol – dimana demokrasi menjadi satu paket dengan parpol, parlemen, dan pemilu. Jadi demokratis dan tidaknya sistem politik suatu negara tergantung dengan keberadaan parpol. Memang kuantitas (jumlah) dan kualitas (sepak terjang) parpol berperan penting terhadap fluktuasi politik nasional. Artinya, jumlah parpol yang proporsional dapat memberikan stabilitas politik. Namun seringkali pemimpin - pemimpin yang menunjang sistem politik di Indonesia cenderung berkesimpulan bahwa masalah pokok yang berdiri dibelakang semua kelemahan partai ialah jumlah partai yang terlalu banyak. Inti masalahnya ialah, apakah dengan menyederhanakan jumlah partai

bisa menciptakan perbaikan terhadap kehidupan partai. Pada kenyataannya, sejak tahun 1961 telah beberapa kali dilaksanakan usaha untuk mengurangi jumlah partai, tetapi justru dipandang menjadi penyebab lahirnya otoritarianisme baru. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa heterogen yang memerlukan perhatian khusus mengenai primordialisme, dengan memperhatikan lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modern, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing dimana semua itu harus diintegrasikan dan diartikulasikan oleh parpol.

Bagaimanapun parpol bisa menjalankan beberapa fungsi, yaitu: sebagai sarana komunikasi politik yang bersifat dua arah; sebagai sarana sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai dalam rangka peningkatan identitas nasional dan memupuk integrasi nasional; sebagai sarana rekrutmen politik; sebagai sarana pengatur konflik dimana parpol dapat mengatur sedemikian rupa agar dampak negatif pertikaian yang berdasarkan etnis, status sosial ekonomi atau agama bisa diminimalisir sehingga kohesifitas bangsa bisa tetap terjamin.⁴⁵ Jadi dengan sendirinya jumlah parpol yang tidak proporsional membawa konsekuensi - konsekuensi lebih jauh, sebab dapat mereduksi fungsi parpol itu sendiri. Sungguh pun demikian, publik Indonesia menghendaki demokrasi yang lebih mengarah pada substansi daripada aspek prosedural, dimana demokrasi bisa menghadirkan keadilan sosial. Artinya, kalau pun restriksi terhadap jumlah parpol namun harus tetap mengikuti kaidah - kaidah demokrasi.

Kehidupan politik era reformasi dari aspek demokrasi dapat dicermati dari dua perspektif. *Pertama*, prosedural - tekstual. *Kedua*, substansial. Dalam perspektif prosedural - tekstual, proses demokratisasi telah berlangsung dengan sangat cepat, dimana perubahan fundamental sebagai upaya membangun struktur kekuasaan telah dilakukan. Perubahan dimaksud adalah, bagaimana pewujudan kedaulatan rakyat dituangkan dalam suatu konstitusi. Kenyataan ini bisa dilihat dari amandemen UUD '45, UU pemilu dan parpol, pemilihan Presiden / Kepala Daerah langsung, pembentukan DPD, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Akan tetapi, dari perspektif substansial, proses demokratisasi masih jauh dari impian. Hal ini bertolak dari *performance* partai sebagai pilar demokrasi. *Performance* parpol dipandang masih jauh dari harapan. Bahkan

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal 17-19.

penampilan mereka di parlemen seringkali tidak mencerminkan kehendak masyarakat sebagai pemberi mandat. Parpol masih dipandang sebagai kumpulan para elit yang berburu kekuasaan.⁴⁶ Maksudnya, kebijakan parpol tidak terintegrasi dengan harapan masyarakat atas peran mereka - ditambah dengan perilaku elit politik yang tidak terintegrasi dengan aspirasi masyarakat yang memilih mereka.

Akibatnya, preferensi publik tidak selalu sejalan dengan preferensi parpol, misalnya saja dalam pemilihan kepala daerah yang tidak mencerminkan preferensi dari parpol pendukung. Berdasarkan survey pasca pencoblosan atau *exit poll* terhadap Pilkada Jawa Barat, ternyata figur dan kemampuan calon Gubernur menjadi faktor yang jauh lebih menentukan arah pilihan publik ketimbang kendaraan politik atau parpol pengusung pasangan calon. Memang kesamaan agama dan parpol menjadi salah satu pertimbangan, akan tetapi jumlahnya tidak begitu signifikan.⁴⁷ Meskipun begitu, publik masih yakin bahwa tanpa parpol tidak ada demokrasi walaupun signifikansi dari peran mereka dinilai belum maksimal, terutama dalam aspek integrasi.⁴⁸

Buruknya kinerja dan citra parpol, ditambah dengan ketidak mampuan parpol melakukan kaderisasi telah menyebabkan keraguan terhadap parpol sebagai lembaga politik dalam mencetak pemimpin yang handal.⁴⁹ Disamping persoalan performance parpol, ternyata kultur politik dari sebagian besar partai masih feodalistik. Adalah suatu ironi ketika struktur politik secara makro bergerak ke arah demokratisasi, namun pilar demokrasi itu sendiri masih memelihara nilai - nilai paternalistik. Ironisnya lagi, ditengah kesadaran paternalistik masyarakat ternyata parpol tetap memelihara nilai - nilai feodalisme. Hal semacam ini amat terkait dengan upaya untuk mempertahankan status quo. Jadi tidak aneh bila sebagian tokoh partai menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok. Namun perilaku demikian justru melahirkan pesimistis terhadap peran parpol. Karena itu, parpol menurut Soewarno harus berbenah diri dalam menjawab problem bangsa,⁵⁰

“subyeknya harus benar. PDIP sebagai subyek perjuangan harus benar dulu, baru bisa berbicara orang lain. Jadi subyeknya harus benar dulu secara ideologi, politik, strategi, program, dan implementasinya sehingga menjadi acuan secara keseluruhan untuk kemudian menyelesaikan semua problem. Sehingga bukan represi yang

⁴⁶ Kompas, Jejak Pendapat Kompas, “Peran Parpol dalam Pemilu Dikurung”, 26 Maret 2007.

⁴⁷ Kompas, 15 April 2008.

⁴⁸ Media Indonesia, Survei Litbang Media Group, “Rakyat masih Percaya Parpol, 29 Maret 2007.

⁴⁹ Kompas, Jejak Pendapat Kompas, “Keberadaan Parpol Mulai Terkikis,” 16 April 2007.

⁵⁰ *Loc. Cit.*, Soewarno, tanggal 13 September 2007.

digunakan sebagai sarana tetapi sistem yang baiklah yang dapat mencegah itu semua.”

Pandangan serupa ditandaskan oleh Untung Wahono, bahwa persoalan mendasak dalam rangka kerjasama antar partai dewasa ini adalah mensolidkan diri mereka sendiri.

“... kalau suatu partai itu solid, partai manapun itu akan memudahkan kami berkoalisi. Tentu kewajiban kami adalah bagaimana kami mengkonsolidasikan partai sehingga solid. Sehingga apa yang menjadi langkah kami itu betul - betul langkah bersama, kalau satu partai itu ngak solid, terpecah - pecah, faksi - faksi, pengambilan keputusan ngak jelas, bagaimana kami bekerjasama. ... yang paling penting bagaimana partai - partai itu mensolidkan dirinya dulu, mengkonsolidasikan diri.”⁵¹

Artinya, keterpurukan citra parpol era reformasi akibat fungsi yang diemban oleh parpol tidak berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari pengorganisasian internal, penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat sampai dengan degradasi kemampuan parpol untuk mengelola kebijakan. Tindakan kader parpol yang duduk di legislatif dan eksekutif turut menentukan citra parpol di mata publik. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan Kompas pada bulan April 2007, ternyata 66% responden menyatakan tidak puas dengan wakil rakyat yang dipilih pada pemilu 2004. Bahkan kepercayaan publik terhadap peran parpol dalam menjaga kesatuan nasional hampir berbanding seimbang, yaitu antara 49%:43,4%, termasuk dengan masalah pengelompokan berdasarkan SARA / daerah.

Realitas tersebut diatas merupakan produk dari partai yang secara mendadak memperoleh kekuasaan tanpa mempunyai persiapan kader yang memadai. Oleh karena itu, berharap secara berlebihan kepada parpol yang pola rekrutmen elit-nya miskin pengalaman, dengan keterampilan serta komitmen terhadap platform perjuangan yang rendah merupakan ilusi. Terutama pada saat proses demokratisasi memproduksi sistem oligarki, baik di lingkungan parpol maupun di lembaga - lembaga politik lainnya, khususnya di parlemen. Dengan demikian parlemen dan parpol hanya menjadi sarana penyaluran sumber daya negara guna memperkuat oligarki politik. Berbagai undang - undang dan peraturan yang dihasilkan atas dasar kompromi politik pada gilirannya hanya akan menghasilkan elit politik yang tidak peduli, tidak memihak kepada keprihatinan dan kepentingan rakyat banyak. Bahkan undang - undang hanya menjadi instrumen untuk meneguhkan kekuasaan dan hanya memberi sedikit ruang kontrol bagi masyarakat. Akibatnya, sejumlah peraturan perundang - undangan yang diproduksi cenderung tidak berkorelasi dengan kepentingan publik secara menyeluruh. Hasilnya, perilaku elit politik

⁵¹ *Loc.Cit.*, Untung Wahono, tanggal 02 Oktober 2007.

sebagai cerminan kebijakan parpol belum berkorelasi dengan kepentingan masyarakat - perilaku integratif parpol dengan masyarakat belum optimal karena elit abai terhadap permasalahan masyarakat. Suatu realitas yang dibenarkan oleh Guruh Soekarnoputra.

“Jika hendak bicara idealisme, idealnya penerus itu adalah orang - orang muda yang the best man. Dengan begitu, yang harus menjadi pengganti ialah kader penerus. Nah itu kalau bicara ideal. Akan tetapi kenyataannya masih dari yang tua karena kader muda kualitasnya masih pada taraf kwalitas orang yang punya “niatan baik sebagai kader.” Orang - orang nasionalis sich ada tapi yang ideal itu adalah kader. Kader itu artinya orang siap, disamping siap ia adalah orang tahu permasalahan, seluk - beluk permasalahan, apakah tentang partainya, apakah tentang bangsa, apakah tentang negara. Jadi betul - betul tahu perkembangan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dan idealnya kita mesti punya banyak orang begitu.”⁵²

Disinilah makna penting perilaku integratif parpol dengan masyarakat yang tercermin dari kebijakan kader partai yang ada di eksekutif, legislatif, maupun dalam struktur partai itu sendiri. Artinya, pola rekrutmen kader yang dilakukan secara sehat dan terencana dengan baik untuk kemudian melakukan regenerasi - melanjutkan estafet kepemimpinan dapat menunjang perilaku integratif kader partai. Bagaimanapun parpol merupakan salah satu regulator bagi pelaksanaan sirkulasi kepemimpinan bangsa dan negara yang tercermin dari kebijakan publik parpol melalui para kadernya. Sehingga kualitas dan masa depan integrasi nasional dapat dinilai dari sejauh mana “keseriusan” parpol menyiapkan resources kader, terutama dalam melakukan transformasi nilai dan komitmen terhadap nation state Indonesia ditengah evolusi peradaban.

IV.3. Pola Rekrutmen Dalam Aspek Integrasi Nasional

Pola rekrutmen yang diterapkan parpol secara umum bisa dikelompokkan menjadi tiga: **Pertama**, rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi posisi / jabatan publik dalam rangka merebut atau mempertahankan kekuasaan politik; **Kedua**, rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan struktur (pengurus) partai, mulai dari tingkat nasional sampai dengan dusun / Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat organisasional dalam rangka memenuhi hakekat dan fungsi keberadaan partai; **Ketiga**, rekrutmen kepada perseorangan atau lembaga untuk memperbesar dukungan pada saat pemilu / pilkada. Biasanya, rekrutmen ditujukan kepada publik figur

⁵² Wawancara Guruh Soekarnoputra, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan pada tanggal 06 Oktober 2007 di Jalan Sriwijaya Raya 26 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan.

seperti artis, tokoh masyarakat, tokoh agama atau kelompok - kelompok sosial tertentu yang memiliki pengaruh ditengah - tengah masyarakat.

Dalam rangka mengembalikan fungsi parpol sebagaimana mestinya, agenda paling mendesak adalah kaderisasi. Bagaimanapun parpol harus memproduksi kader yang memadai untuk menjalankan roda organisasi dan kebijakan publik. Mereka perlu mendidik kader agar mempunyai karakter dan mentalitas - bahwa keberadaannya sebagai kader merupakan panggilan hidup (*pengabdian*) atau cita - cita ataupun keyakinan. Disamping itu, kader harus di didik agar memiliki keterampilan untuk menerjemahkan ideologi partai menjadi kebijakan publik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, PDI Perjuangan melakukan sejumlah terobosan, sebagaimana diungkapkan Pramono Anung,⁵³

“Kami melakukan berbagai bentuk kaderisasi: ada kaderisasi yang untuk ideologi dan itu ada dibawah bidang kekaderan tetapi ada kaderisasi yang bersifat program. Dan sekarang ini lebih menonjolkan pada kaderisasi yang bersifat program. Dimana sudah sampai ke angkatan 36. Mereka dilatih tidak lagi hanya tentang kepartaian tetapi bagaimana kader berladang, menjadi mekanik, membuat mie. Hal itu yang kami lakukan dan sekarang menjadi kekuatan PDI Perjuangan - sebagai kekuatan utama kami. Bahkan selain masalah - masalah ekonomi rakyat, kami juga ada pendidikan khusus untuk Kiai Kampung. Sekarang sudah angkatan ke-4 bagi aktivis Gereja, Katolik, Hindu dan lain sebagainya.”

Bagi PDI Perjuangan, kaderisasi bukan sekedar upaya memperluas dukungan dan partisipasi politik masyarakat tetapi sekaligus sebagai bagian dari konsolidasi. Sebab konflik dan perpecahan internal terus berlangsung sejak awal kehadirannya. Demikian pula pasca Kongres II PDI Perjuangan di Bali, Maret 2005. Suatu realitas yang sempat membuat apresiasi publik menciut bila dibandingkan dengan popularitas mereka pada tahun 1993-1999. Merosotnya popularitas itu disebabkan oleh beberapa faktor, selain konflik internal, buruknya kinerja partai, problem komunikasi politik Megawati ketika menjadi Presiden, ditambah dengan daya dukung partai yang tidak dapat mengimbangi peningkatan kuantitas - baik sumber daya manusia maupun sistem disegala lini - mulai dari pusat hingga daerah.

Dengan demikian, PDI Perjuangan melatih kadernya agar mempunyai semangat kebersamaan dan kesetaraan melalui pola rekrutmen yang sistematis. Maksudnya, sebagai kader ia memiliki kesempatan yang sama untuk meniti karir sampai jenjang tertinggi pada partai bersangkutan. Sebab tanpa proses kaderisasi, partai hanya akan menjadi institusi

⁵³ Wawancara Ir. Pramono Anung Wibowo, MM, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, tanggal 25 September 2007 di kantor DPP PDI Perjuangan - Jakarta.

yang menjadi instrumen perebutan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Bahkan, bila parpol tidak melakukan proses pengkaderan secara benar, dampak negatifnya bukan hanya pada kelangsungan hidup partai bersangkutan tetapi lebih dari itu, masa depan bangsa secara keseluruhan dipertaruhkan, sebagaimana diungkapkan Soewarno selaku fungsionaris DPP PDI Perjuangan.

“Jika sekarang PDI Perjuangan tidak berhasil dalam melakukan ideologisasi - kader, maka bukan hanya suram bagi PDI Perjuangan tetapi suram bagi bangsa dimasa yang akan datang. Sebab Pancasila sebagai roh bangsa akan pudar, dan tanda - tanda kearah sana makin nyata.”⁵⁴

Permasalahan regenerasi dan pembaharuan didalam tubuh PDI Perjuangan memang menjadi salah satu wacana menjelang Kongres II. Bahkan sebagian pengamat mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan mengalami stagnasi bila tidak melakukan pergantian kepemimpinan di dalam tubuh partai.⁵⁵ Silang pendapat pun bermunculan, ada yang menganggap regenerasi kepemimpinan atau pembaharuan yang dimaksudkan bukan mengganti posisi ketua umum yang sejak Kongres Luar Biasa di Surabaya atau Musyawarah Nasional di Jakarta tahun 1993 sudah dipengang oleh Megawati. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain berpandangan bahwa yang dimaksud dengan pembaharuan adalah melakukan perubahan mekanisme internal partai dan mengurangi hak prerogatif ketua umum.

Perbedaan menjelang pelaksanaan Kongres memang kerap kali menimpa PDI Perjuangan untuk kemudian kelompok yang tidak puas (kalah) mendirikan partai baru. Kenyataan itu bertolak dari regenerasi yang menerapkan seleksi alamiah, sehingga dengan sendirinya kelompok yang tersingkir akan terpentol dari kehidupan intern partai.

“Regenerasi adalah sesuatu yang alamiah, seperti pohon saja - yang tua rontok dengan sendirinya, kemudian tumbuh yang baru. Jadi regenerasi tidak bisa dipatok berdasarkan usia, dimana yang muda harus memimpin - itu tidak bisa. Karena semakin maju suatu negara semakin tua negarawan. Sebab untuk mencetak orang seperti dia bukanlah sesuatu yang mudah - kepintaran politik bukan hanya membaca buku - ia lahir dari proses perjuangan dan kemampuan menyerap teori. Artinya, sepanjang masih dibutuhkan, ya dimaksimalkan saja - kecuali memang tidak mampu. Singkatnya, tetap harus ada proses regenerasi tetapi tetap dilakukan secara alamiah.

⁵⁴ Wawancara Soewarno, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, tanggal 13 September 2007 di Komplek Perumahan DPR RI - Kalibata, Jakarta.

⁵⁵ Koran Tempo, 26 Maret 2005.

Dengan begitu perlu mendorong yang lebih muda untuk maju tetapi tidak memaksakan – tanpa berpegang pada obyektifitas.”⁵⁶

Pola rekrutmen demikian memang bisa menjadi salah satu sumber konflik yang membawa dampak bagi regulasi kader. Pola regenerasi yang mengedepankan seleksi alamiah memiliki kelemahan terhadap kesinambungan program partai bila tidak didukung oleh pola rekrutmen dan kaderisasi yang terencana secara baik, sebab akan melahirkan politisi petualang (barisan sakit hati yang suka pindah - pindah partai / haluan politik), setidak - tidaknya di level elit karena pada tingkat grassroot yang masih paternalistik tetap memandang Megawati sebagai putri sulung sang Proklamator.

Konflik internal dan regulasi kader merupakan suatu siklus yang saling kait - mengkait. Perpecahan tidak hanya membawa konsekuensi organisasi, akan tetapi lebih daripada itu, proses atau mekanisme rekrutmen pun terhambat. Perpecahan yang mendera PDI Perjuangan menurut Noviantika Nasution telah mengakibatkan perolehan suara partai ini merosot pada pemilu 2004.⁵⁷ Bahkan banyak pendukung hengkang akibat perpecahan yang tidak dapat memberikan jaminan karir yang sangat penting bagi proses rekrutmen di partai dan jabatan publik (baik eksekutif maupun legislatif). Sementara jaminan karir merupakan hal yang amat penting bagi masa depan kader. Noviantika menambahkan, bahwa jaminan jenjang karir (*carrier path*) dalam partai modern diwujudkan dengan kejelasan jalur karir yang sesuai dengan kompetensi kader bersangkutan. Sehingga para kader bisa membangun kapasitas dirinya - dengan meningkatkan kompetensi, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas. Dengan begitu kader dapat merencanakan karirnya (*carrier planning*), termasuk strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai posisi politik dan pemerintahan yang diinginkan. Bertolak dari kenyataan bahwa rekrutmen kader belum sesuai dengan harapan sebagian anggota yang ada didalamnya, maka aktivis PDI Perjuangan keluar meninggalkan partai untuk kemudian mendirikan partai baru pasca Kongres I / II. Artinya, pola rekrutmen politik amat menentukan bagi kesinambungan program dan kohesi internal partai.

Jika Soewarno memandang regenerasi dengan mendorong yang lebih muda untuk maju tetapi tidak memaksakan, berbeda dengan Pramono Anung yang menganggap bahwa saat ini telah berlangsung proses regenerasi di PDI Perjuangan.

⁵⁶ Wawancara Soewarno, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, tanggal 13 September 2007 di Komplek Perumahan DPR RI - Kalibata, Jakarta.

⁵⁷ Noviantika Nasution, *Faktor Penyebab Turunnya Suara PDI Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2004*, Depok: Tesis Magister Universitas Indonesia, 2005. hal. 106-107.

“Sekarang ini, praktis pimpinan - pimpinan partai pada tingkat propinsi dan daerah sudah muda. Sedangkan di level nasional memang masih Ibu Megawati, tetapi praktis DPP sekarang ini adalah DPP-nya anak muda, karena mayoritas adalah orang - orang dibawah umur 45 tahun yang memimpin partai saat ini. Dengan demikian proses regenerasi berjalan secara alamiah, itulah yang saya sebut dengan membangun system building dan partai.”⁵⁸

Terlepas dari perbedaan konsep mengenai regenerasi yang dilakukan oleh parpol atau bahkan elit politik. Persoalan yang perlu diketengahkan disini, bahwa regenerasi merupakan konsekuensi obyektif dari rekrutmen politik. Regenerasi memiliki tujuan internal dan eksternal – sebagai siklus rekrutmen fungsionaris pengurus partai sekaligus pejabat publik. Artinya, regenerasi amat penting bagi integrasi nasional. Regenerasi menentukan kesinambungan program partai dalam menjamin kelangsungan kohesi sosial ditengah - tengah masyarakat. Komitmen kebangsaan dan jati diri PDI Perjuangan sebagai partai terbuka tergantung pada kemampuan partai dalam melakukan transformasi nilai dan rekrutmen. Terutama bila memperhatikan komposisi keanggotaan PDI Perjuangan yang mengutamakan keunggulan jumlah - dengan sifat dan berorientasi sebagai *patronage party* yang secara organisasi kendor, memiliki disiplin yang lemah, karena maksud utamanya untuk memenangkan pemilu. Namun dalam perkembangannya ia menggunakan berbagai kriteria dan prosedur guna mendapatkan resources terbaik dalam rangka menjadi partai modern. Soewarno menerangkan bahwa,⁵⁹

“Pola rekrutmen ideal yang coba diterapkan oleh PDIP adalah terpenuhinya kriteria minimum seperti syarat pendidikan umum, lamanya dedikasi kader dipartai, karakter perorangan, dan sebagainya. Jadi saya mencoba menerapkan kriteria yang cukup ideal akan tetapi harapan adalah sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, karena depolitisasi dan deideologisasi yang diterapkan oleh Orde Baru masih kita rasakan sampai saat ini, dimana keberadaan kedua partai hanya menjadi pelengkap pada waktu itu. Jika eksistensi dari kedua partai era Orde Baru saya istilahkan - “harus ada tidak boleh besar, harus ikut tidak boleh menang.” Dengan begitu parpol tidak bisa tumbuh secara sehat karena partai bukan sebagai alat perjuangan rakyat, partai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, dan partai sebagai tempat pendidikan rakyat tidak berfungsi. Maka ketika ruang demokrasi terbuka - PDI Perjuangan pun lahir dari sekumpulan orang terpinggirkan dengan berbagai “warna”. Jadi PDIP ketika itu merupakan semua orang terpinggirkan - korban dari sistem otoriter Orde Baru yang berkumpul dan mengikuti orang yang berani melawan didepan yaitu Megawati. Jadi PDIP itu ada Masyumi-nya, ada IPKI, ada PSI / Murba, PNI, ada Parkindo, ada Partai Katolik, yang masing - masing partai membawa warnanya sendiri - sendiri. Oleh sebab itu dilakukan pendidikan dan pelatihan.”

⁵⁸ *Loc.Cit.*, Pramono Anung, tanggal 25 September 2007.

⁵⁹ *Loc.Cit.*, Soewarno, tanggal 13 September 2007.

Aspek heterogenitas rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan memang membutuhkan keseriusan dalam mengelola fungsi kelembagaan partai. Akan tetapi, hal ini sekaligus menegaskan bila PDI Perjuangan bersungguh - sungguh untuk melaksanakan peran integrasi nasional mulai dari dalam partai. Hal ini tercermin dari keberadaan kader dan fungsionaris pengurus PDI Perjuangan yang sangat heterogen bila dilihat dari aspek etnis (daerah) baik dari Jawa maupun luar Jawa. Disamping unsur fusi yang sudah ada, ternyata aspek budaya (agama) tetap diakomodir dengan cukup baik, misalnya saja dengan adanya organisasi sayap partai seperti Baitul Muslimin. Bahkan lebih dari itu, meskipun kaderisasi yang diterapkan belum cukup ideal tetapi sebagian besar kader yang menjadi pimpinan partai telah mengikuti kaderisasi diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan, maupun organisasi kepemudaan yang ada di tanah air. Hal itu sebagai salah satu bentuk rekrutmen politik. Kebijakan semacam ini memungkinkan bagi mereka untuk mengagregasi dan mengartikulasi semua potensi / aspirasi masyarakat. Dengan demikian, jati diri PDI Perjuangan sebagai partai terbuka telah menempatkan ia untuk menjadi katalisator karena menanamkan kesadaran nasional dan jati diri bangsa melalui kaderisasi.

Berbeda halnya dengan rekrutmen yang dilakukan oleh PK Sejahtera. Ia memang lebih terencana bila dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Kenyataan ini lahir dari keberadaan dirinya sebagai partai kader yang bertujuan untuk melaksanakan dakwah, sehingga aspek homogenitas sangat kental diterapkan dalam PK Sejahtera, terutama pada posisi - posisi struktural yang menentukan bagi kesinambungan misi dakwah. Mereka memberikan batasan - batasan dalam rekrutmen -- hal mana tercermin dari definisi partai terbuka yang dikemukakan oleh Ahmad Zainuddin,

“PKS sudah menjadi partai terbuka! Jadi siapapun boleh menjadi anggota PKS, termasuk non Muslim. Tapi untuk mengisi posisi - posisi strategis ada persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan PK Sejahtera membagi posisi strategis menjadi dua yaitu posisi strategis untuk jabatan publik dengan posisi strategis untuk jabatan di organisasi. Dan masing - masing posisi strategis itu memiliki kriteria yang berbeda. Dimana posisi strategis di organisasi lebih ketat daripada posisi strategis untuk jabatan publik.”

Jadi maklum saja bila semua jajaran pengurus DPP PK Sejahtera beragama Islam. Memang ada pengecualian di beberapa daerah yang mayoritas non Muslim seperti di Papua dan NTT. Kebijakan itu berkorelasi positif dengan penguasaan wilayah secara geografis disamping kebutuhan untuk menjalankan misi dakwah partai. Bagaimanapun ia

perlu menempatkan kader – kadernya diberbagai lini kehidupan sosial politik kemasyarakatan - melalui kerangka acuan konsep mobilitas yang mereka rumuskan.

“Konsep regenerasi diterapkan melalui model mobilitas, ada yang dikasih dengan mobilitas internal dan ada mobilitas eksternal. Mobilitas internal adalah orang - orang yang memang membangun perannya, kontribusinya, posisi strukturalnya didalam lingkungan partai. Karena PKS ini partai dakwah jadi memang begitu banyak pos - pos pekerjaan dan peran - peran struktural yang bisa dilakukan. Mulai dari level ranting, cabang, daerah, wilayah sampai pusat, ini terbuka kebutuhan yang begitu besar. Proses regenerasi kedua adalah terjadinya mobilitas eksternal dari orang - orang yang mengalami pematangan dalam mobilitas internal, yaitu orang - orang yang kemudian mendapatkan tugas untuk bekerja diwilayah publik, apakah dia menjadi anggota legislatif atau menjadi orang yang diperjuangkan untuk duduk di pentas kepemimpinan eksekutif, dan seterusnya. Termasuk mereka yang diharapkan untuk mengembangkan peran - peran nyata mereka diwilayah privat, wilayah ekonomi misalnya. Nah itu kami dorong! Karena kami sadari bahwa keterlibatan peran - peran diwilayah publik ini menuntut waktu, fikiran dan perhatian yang lebih serius, maka kami harapkan terjadi suatu proses transformasi dari bawah, mereka – mereka yang sudah masuk wilayah publik adalah orang yang semakin minim peran atau keterlibatannya diwilayah mobilitas internal. Kedua kami terjemahkan dalam mobilitas vertikal, yang tadi sudah saya gambarkan adalah konsep regenerasi horisontal. Artinya apa, cukup banyak kader - kader PKS yang ketika kemudian ia tidak mendapatkan jabatan atau fungsi struktural tapi guna mengembangkan kerja - kerja sosial yang sifatnya horisontal, dan itu juga punya nilai kontribusi bagi dakwah - pengembangan PKS.”⁶⁰

Meskipun tidak ada fungsionaris DPP dan anggota DPR RI dari PK Sejahtera yang beragama non Islam, namun dari aspek etnis ia relatif cukup heterogen, khususnya antara etnis Jawa dan luar Jawa. Dengan demikian, PK Sejahtera tetap bisa menjalankan peranan integrasi dari dalam partai. Terutama bila mencermati pola rekrutmen pejabat publik yang dilakukan dengan cukup akomodatif, baik dari segi etnis maupun agama.

Jadi dalam melakukan penguatan hak warga negara sekaligus untuk mendapatkan resources, baik PDI Perjuangan maupun PK Sejahtera melaksanakan rekrutmen dan pembinaan (kaderisasi) kader. Rekrutmen diperuntukkan sebagai pengurus struktural partai dan pejabat publik (baik di legislatif maupun eksekutif) untuk kemudian menjadi kepanjangan tangan partai dalam mengimplementasikan kebijakan agar sesuai dengan platform partai bersangkutan, serta sebagai upaya untuk memperluas dukungan ditengah - tengah masyarakat dalam rangka meraih kekuasaan melalui pemilu.

Akan tetapi, kedua partai memiliki perbedaan dalam melakukan rekrutmen dan pembinaan kader, termasuk dalam hal ini adalah kriteria yang ditetapkan sebagai dasar

⁶⁰ Wawancara, Mahfudz Sidiq, Ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PK Sejahtera, tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI Lt. 3 Jakarta.

kebijakan. Menurut Ahmad Zainuddin, PK Sejahtera menetapkan kriteria - kriteria khusus dalam melakukan rekrutmen. Sebagai partai Islam, yang bisa menduduki jabatan dan memiliki fungsi - fungsi tertentu adalah orang yang memenuhi kriteria. Kualifikasi itu koheren dengan keberadaan PK Sejahtera sebagai partai kader yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Meskipun pada program - program tertentu ia dapat bekerjasama dengan siapa pun - terbuka untuk siapa saja, termasuk bekerjasama dengan non Muslim didalam membangun kehidupan berbangsa, sehingga dimungkinkan bagi semua pihak untuk berperan dalam program partai pada batas - batas tertentu. Namun kebijakan tersebut tidak diterapkan pada semua level.

Berbeda halnya dengan PDI Perjuangan yang melakukan rekrutmen secara terbuka dalam segala aspek, baik untuk fungsionari partai maupun pejabat publik.

“Rekrutmen kami sangat terbuka! PDI Perjuangan sekarang sudah menggunakan sistem skoring dan juga riset atau polling. Untuk rekrutmen menjadi Kepala Daerah, selain dukungan dari internal maka dia harus memenangkan riset atau polling yang diadakan oleh partai secara independen. Dan semua pemilihan tidak ada yang tidak kami polling karena itu PDI Perjuangan unggul jika dibandingkan dengan partai - partai lain! Dan sekarang ini praktis PDI Perjuangan lebih leading daripada partai lain untuk pemilihan Gubernur langsung. Sekarang 10 Gubernur dari PDI Perjuangan kemudian untuk Bupati / Walikota dari yang sudah terjadi pemilihan itu hampir 43%. Adapun pemilu legislatif nanti tetap kami lakukan polling. Satu tentu adalah, jejak rekam dia didalam partai - kapabilitas, kapasitas, loyalitas didalam - struktur partai; Kedua, kami melakukan polling; Ketiga, kami juga membuka untuk fresh blood guna memperkuat partai - darah baru ini tentu adalah orang-orang yang mempunyai nama di publik.”⁶¹

Tegasnya, pola rekrutmen dalam aspek integrasi nasional amat penting karena sangat terkait dengan transformasi ideologi sebagai suatu sistem nilai melalui peran parpol sebagai sarana sosialisasi / komunikasi dan pendidikan sebagai salah satu cara untuk membangun kesadaran nasional. Apalagi kedua parpol memiliki perbedaan substansi ideologi cukup mendasar disamping metode. Selain itu, kedua parpol juga mempunyai perbedaan pandangan yang cukup tajam mengenai masa depan negara nasional. PK Sejahtera misalnya, selain menetapkan segmentasi transformasi hanya pada orang Islam ternyata ia mencitakan nilai - nilai fundamen yang berbeda sama sekali dengan PDI Perjuangan. Perbedaan itu tampak dari materi kaderisasi sebagai bagian transformasi nilai dari parpol :

⁶¹ Wawancara Pramono Anung W., Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, tanggal 25 September 2007 di kantor DPP PDI Perjuangan-Jakarta.

“Sebenarnya materi kaderisasi itu ibarat orang ingin tahu Islam. Artinya, sangat terkait dengan apa yang ingin diketahui dari Islam itu. Jadi yang kami sampaikan menyangkut masalah-masalah fiqih, al-hadist, tafsir untuk di pengajian-pengajian. Selain pengajian, ada training-training yang sangat terkait dengan keanggotaan. Training itu disesuaikan dengan kadar keanggotaan, ada training dasar 1 dan 2, ada training lanjutan 1 dan 2. Dimana materinya seputar wawasan keislaman secara umum, masalah politik, PKS itu apa dan bagaimana.”⁶²

Berbeda halnya dengan materi kaderisasi PDI Perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Soewarno:⁶³

“Materi Pertama adalah pentingnya ideologi bagi parpol - kegunaan ideologi bagi parpol. Karena selama 35 tahun ideologinya adalah modal asing, ideologi no - utang yes! Kedua, sejarah dan substansi dari Pancasila 1 juni 1945; Ketiga, Metode berfikir yang digunakan oleh Bung Karno sebagai pisau analisa; Keempat, perbandingan antara Pancasila dengan ideologi besar dunia; Kelima, tinjauan Pancasila terhadap berbagai pemikiran kontemporer dibidang ideologi. Apa itu new life, apa itu fundamentalisme, apa itu neoliberalisme, apa itu teologi pembebasan. Itu semua harus diketahui oleh kader - kader supaya tidak menjadi “Keris yang dimasukkan kedalam dadanya sendiri.” Dengan begitu perlu menyebarluaskan teori dan pemikiran Bung Karno. Sebab Bung Karno selain berjuang sekaligus mengajarkan cara berjuang.”

Metode kaderisasi PDI Perjuangan sebagai partai kelas bersifat terbuka namun PK Sejahtera sebagai partai agama relatif tertutup. Apabila PDI Perjuangan membuka diri secara sungguh - sungguh tanpa membedakan ras, suku, agama, dan antar golongan (SARA) maka PK Sejahtera sebagai partai agama dan partai kader hanya membuka diri secara terbatas karena amat terkait dengan kepentingan dakwah. Namun perbedaan itu tidak mengurangi peranan parpol untuk menjadi sarana komunikasi, melakukan sosialisasi dan rekrutmen termasuk sebagai pengatur konflik dengan cara mengagregasi kepentingan yang saling bertentangan dan membahayakan kepentingan nasional. Artinya, walaupun kedua parpol mempunyai perbedaan metode dan orientasi ideologi namun perbedaan semacam itu dapat diatasi dengan adanya keseimbangan (tarik-tolak) untuk melakukan perundingan dalam merumuskan sistem nilai yang akan dikembangkan pada lingkup politik nasional.

Jadi dalam konteks integrasi nasional, perbedaan doktrin kaderisasi merupakan upaya parpol untuk mengagregasi kepentingan masyarakat dengan menanamkan nilai - nilai ideal yang mereka yakini. Sekaligus menjadi upaya parpol untuk menanamkan atau menawarkan nilai - nilai baru. Justru disinilah arti penting peran parpol sebagai sarana

⁶² Wawancara Ahmad Zainuddin, Ketua Pembinaan Kader DPP PK Sejahtera, tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta.

⁶³ Wawancara Soewarno, ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, tanggal 13 September 2007 di Komplek Perumahan DPR RI - Kalibata, Jakarta.

penyelesaian konflik agar tidak mengarah pada disintegrasi bangsa. Sebab demokrasi tidak menutup kemungkinan bagi tumbuh dan berkembangnya semua nilai – tentu sepanjang tidak merusak konsensus dan identitas nasional sebagai negara berdaulat. Apalagi semua partai di Indonesia bersifat nasional, baik dari pola pengorganisasian maupun orientasi program, ia juga bergerak pada skala nasional. Maksudnya, transformasi yang dilakukan oleh kedua parpol melalui pendidikan atau kaderisasi terhadap simpatisan atau anggotanya memiliki lingkup nasional. Dengan demikian maka orientasi ideologi, pola rekrutmen, struktur kepengurusan yang bersifat nasional, serta semua kebijakan yang diorientasikan pada kepentingan nasional akan menentukan kualitas peranan integrasi nasional dari setiap parpol.

IV.4. Pengorganisasian Nilai Ditengah Perbedaan Platform Antar Partai.

Eksistensi Indonesia sebagai nation state dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah luhur bangsa yang menjadi arah tujuan nasional. Sementara untuk mencapai tujuan nasional, Indonesia dihadapkan dengan berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang harus ditanggulangi. Karena perlu memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mendukung pengembangan kekuatan nasional atau ketahanan nasional.⁶⁴ Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis dari suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negara dan secara faktual membahayakan integritas dan identitas - kelangsungan hidup negara nasional serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.⁶⁵ Disinilah signifikansi peran parpol sebagai sarana integrasi nasional. Bagaimanapun parpol merupakan sumber rekrutmen politik sebagai kesinambungan program guna menjamin kelangsungan agenda nasional. Ia juga merupakan sarana artikulasi yang melaksanakan fungsi komunikasi dua arah serta melakukan pendidikan dalam rangka transformasi nilai, sekaligus dapat mengagregasi kepentingan yang saling bersaing ditengah masyarakat.

⁶⁴ Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003, hal. 92-101

⁶⁵ RM Sunardi, *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta, Hastanas, 1997, hlm. 5

Namun pembangunan politik era Orde Baru tidak membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Negara mengatur kehidupan politik dengan ketat. Demikian pula dengan lembaga - lembaga politik seperti legislatif dan yudikatif - keberadaannya didominasi oleh eksekutif. Kuatnya kontrol negara terhadap aktivitas kehidupan politik ketika itu dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan. Walaupun dalam perkembangannya melahirkan kekuasaan otoriter dan sentralistik yang diatas namakan stabilitas dan pembangunan. Pada akhirnya tata pemerintahan yang dikembangkan oleh Orde Baru adalah kekuasaan yang dibangun tanpa memperdulikan prinsip - prinsip demokrasi politik. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan politik seperti penyederhanaan sistem kepartaian melalui fusi sehingga lahir dua parpol dan satu golongan karya. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi massa, tidak cukup sampai disitu, pemberangusan terhadap ekspresi politik pun dilakukan melalui kebijakan masa mengambang (*floating mass*). Dengan kebijakan masa mengambang, masyarakat dilokalisir keterlibatannya dalam kegiatan - kegiatan politik praktis, ekspresi politik masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan penguasa. Keberhasilan negara melakukan kanalisasi terhadap partisipasi masyarakat kadangkala diikuti pula oleh tindakan - tindakan represif.

Terlepas dari segala implikasi negatif yang diakibatkan oleh praktek kekuasaan Orde Baru yang otoriter, sebenarnya pemberlakuan asas tunggal dalam aspek kehidupan politik yang cenderung mengedepankan loyalitas primordial ada manfaatnya juga. Sebagaimana sudah diketahui bersama, bahwa pada masa sebelumnya terjadi konflik nilai yang didasarkan pada primordialisme masing - masing kelompok, hal mana kemudian membawa dampak pada pewujudan stabilitas nasional, karena masa depan tata kehidupan kebangsaan kembali dipersoalkan dan mencapai anti klimaks sejak 1 Oktober 1965. Atas dasar itulah pemberlakuan Pancasila sebagai satu - satunya asas bagi parpol dan ormas dapat dinilai secara positif. Meskipun dalam perkembangannya terjadi praktek-praktek politik anti demokrasi.

Realitas diatas lahir dari sebuah kesadaran rezim Orde Baru bahwa demokrasi menjadi sumber instabilitas politik yang berujung pada terhambatnya program - program pembangunan nasional. Lebih dari itu, demokrasi dipandang sebagai pemicu kehadiran sentimen - sentimen politik aliran yang berbasis pada kepentingan kelompok dan ideologi sebagaimana terjadi pada era Orde Lama. Jadi, demokrasi dianggap sebagai faktor yang dapat merusak integrasi nasional. Basis kesadaran ini bertolak dari keragaman bangsa

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

Indonesia yang begitu tinggi, sehingga rezim Orde Baru mengkhawatirkan bahwa demokrasi akan memporak-porandakan kohesi sosial yang sudah dibangun melalui dominasi negara. Artinya, demokrasi dipandang terlalu longgar dan tidak memiliki disiplin untuk mewujudkan tertib sosial yang dapat menjamin stabilitas politik dan pembangunan nasional. Karena itu, begitu realitas politik berbalik seratus delapan puluh derajat, euforia politik justru kembali menghadirkan romantisme politik aliran yang selama Orde Baru dipadamkan. Kenyataan ini nampak pada perolehan suara delapan besar parpol era reformasi, (lihat tabel IV.1.).⁶⁶

Tabel IV.2. Perolehan Suara Parpol Dalam Pemilu Demokrasi Liberal

Pemilu 1955	Jumlah Kursi	% Suara	Pemilu 1999	Jumlah Kursi	% Suara	Pemilu 2004	Jumlah Kursi	% Suara
PNI	57	22,32	PDIP	154	30,8	PG	128	21,58
Masyumi	57	20,92	PG	120	24,0	PDIP	109	18,53
NU	45	18,41	PPP	59	11,8	PKB	52	10,57
PKI	39	16,36	PKB	51	10,2	PPP	58	8,15
PSII	8	2,89	PAN	35	7,0	PD	57	7,42
Parkindo	8	2,86	PBB	13	2,6	PKS	45	7,34
P. Katolik	6	2,04	PK	6	1,2	PAN	52	6,44
PSI	5	1,99	PKP	6	1,2	PBB	11	2,62

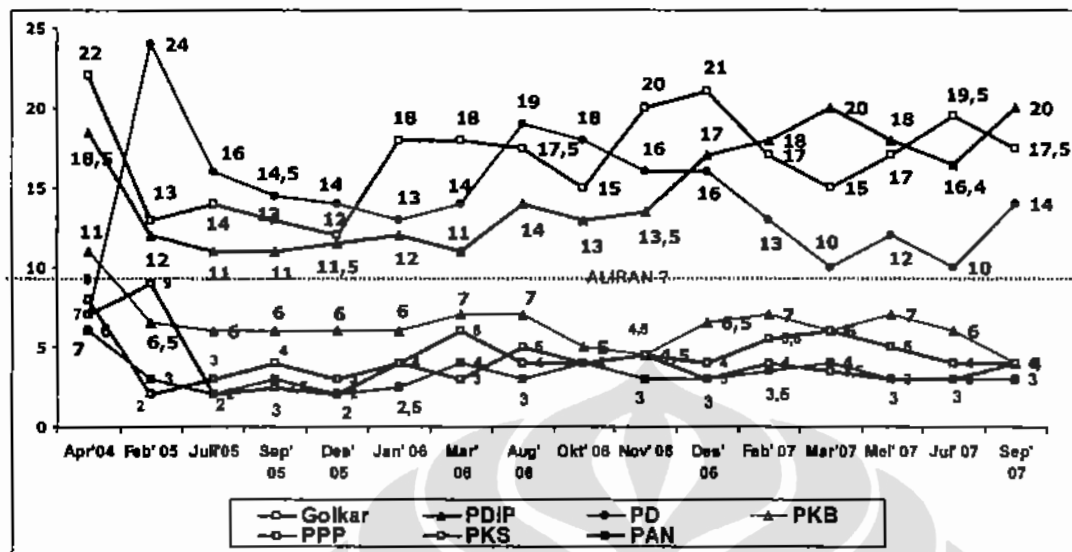
Perolehan suara menunjukan bahwa dalam pemilu demokratis hanya partai - partai berbasis Islam dan kebangsaan yang memperoleh tempat ditengah - tengah masyarakat, kecuali PKI pada pemilu 1955.

Reformasi memang menjadi repetisi (pengulangan) model politik aliran yang kembali mengemuka lewat pemanfaatan kran keterbukaan. Bandul sejarah seolah tidak bergerak maju menuju tatanan kehidupan yang lebih demokratis, egaliter, dan manusiawi tetapi malah mundur dengan membuka kembali "luka-luka politik" lama, baik secara diam - diam ataupun terang - terangan. Namun demikian, partai kebangsaan (netral agama) tetap memiliki tempat dominan ditengah - tengah masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu demokratis. Hal ini terlihat dari perolehan suara parpol pada pemilu tahun 1955, 1999 dan 2004 seperti terlihat pada tabel IV.1. Survey yang dilakukan oleh LSI kembali menegaskan akan hal ini, untuk lebih jelasnya lihat grafik (IV.2.) dibawah ini.⁶⁷

⁶⁶ Sumber : Media Indonesia, 29 Januari 2007.

⁶⁷ Sumber : Hasil Survey LSI, Media Indonesia, 19 Januari 2007; Republika, 14 Desember 2007.

Grafik IV.2. Perbandingan Dukungan Terhadap Partai Kebangsaan dengan Partai Islam



Jadi partai tetap memegang peranan penting dalam kehidupan politik nasional. Menurut Duverger, “usaha - usaha untuk melibatkan parpol dalam arena politik atau dalam pembangunan dengan segala aspek dan dimensinya merupakan hal yang utama dalam membangun masyarakat atas dasar kesejahteraan sosial.”⁶⁸ Apalagi keberadaan partai dominan bagi suatu negara dapat menciptakan kestabilan politik dalam kurun waktu tertentu. Sebab partai dominan dapat melaksanakan strategi dan program - programnya sebagai program pemerintah nasional. Artinya, kelangsungan hidup suatu partai menjadi batu ujian bagi kelangsungan suatu orde politik.

Dalam sejarahnya, peranan parpol terhadap integrasi nasional sangat dinamis. Parpol yang lahir sebelum kemerdekaan terlibat aktif didalam perjuangan pembebasan Indonesia dari cengkeraman kekuasaan kolonial. Namun ketika kemerdekaan diperoleh, mereka pun sering terlibat pertentangan diantara mereka sendiri, sehingga ketahanan nasional menjadi lemah akibat kelalaian partai - partai untuk menjalankan fungsi dan peran mereka didalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan sebelumnya. Dan apabila dicermati, generasi parpol pasca Orde Baru atau era reformasi mengambil pola yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada zaman revolusi kemerdekaan sampai era demokrasi liberal. Dimana sebagian dari mereka berawal dari gerakan yang tertutup untuk kemudian menjadi gerakan terbuka. Maurice Duverger menguraikan bahwa proses pembentukan partai dapat dikelompokkan menjadi dua katagori besar, yaitu: partai yang

⁶⁸ Maurice Duverger, *Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan: Suatu Pengantar Komparatif*, (Dra. Laila Hasyim), Jakarta: Bina Aksara, 1980.
Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

tumbuh didalam lingkaran intra parlemen dan ekstra parlemen. Dalam hal mana PDI Perjuangan bisa dimasukkan kedalam katagori intra parlemen, sedangkan PK Sejahtera masuk dalam kategori kedua – khususnya pada masa Orde Baru..

Disamping katagori tersebut diatas, secara umum partai di Indonesia memilih dua jalur utama, yaitu jalur berbasis kelas dan berbasis aliran. Parpol yang mengambil jalur kelas membedakan diri mereka dengan partai lain berdasarkan pandangan mereka terhadap modal dan kaum buruh, termasuk dengan segala kompleksitasnya. PDI Perjuangan pasca Orde Baru dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ini - mengusung jargon politik sebagai partai “Wong Cilik.” Sedangkan parpol yang mengambil basis aliran membedakan dirinya dengan partai lain berdasarkan pandangan mereka terhadap dunia dan persoalannya - termasuk bagaimana cara memecahkannya. Jalur agama dan kebudayaan menjadi pilihan.⁶⁹ Sebagai partai berbasis agama yang menawarkan Islam sebagai jalan memecahkan persoalan, nyatalah bahwa PK Sejahtera bisa dikategorikan kedalam partai berbasis aliran.

Jika PK Sejahtera memandang syariat Islam sebagai bagian dari jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi, maka PDI Perjuangan memandang bahwa,

“gaya hidup “kebarat-baratan” yang merupakan produk yang tidak terpisahkan dari kapitalisme global telah diterima begitu saja, hampir tanpa filter, oleh generasi muda bangsa kita. Materialisme dan konsumerisme yang bersembunyi di balik wajah budaya “kebarat-baratan” ini telah menjadikan sebagian masyarakat kita kehilangan produktifitasnya. Kehilangan dinamisme dan sikap progresifnya. ... Di sisi lain, gaya hidup “kearab-araban” pun seperti telah menjadi alternatif di ujung pendulum yang lain di dalam kehidupan masyarakat kita. Substansi agama yang universal disamakan begitu saja dengan budaya dari Timur Tengah yang sesungguhnya tidak cocok dengan kepribadian bangsa kita. Yang sungguh-sungguh sangat kita sayangkan adalah, adanya kecenderungan untuk menjadikan nilai-nilai partikular dari budaya “kearab-araban” yang menjurus kepada sektarianisme ini ke dalam peraturan dan perundangan kita. ... Penerimaan yang tanpa filter terhadap budaya “kebarat-baratan” dan “kearab-araban” adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang mewujud dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.”⁷⁰

Dari sini terlihat bahwa PDI Perjuangan bergerak dalam dua dimensi, yaitu dimensi kelas dan dimensi kultur. Suatu kenyataan yang bertumpu pada nilai-nilai tradisionalisme sekaligus kesadaran kelas. Hal ini sejalan dengan fungsi partai yang mereka definisikan dalam Pasal 8 AD hasil Kongres II pada 28-31 Maret 2005 di Bali. Dalam Pasal 8 ayat 1

⁶⁹ Daniel Dhakidae, “Partai-partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-patahan Sejarah,” dalam *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Kompas, 1999, hal. 34-35.

⁷⁰ Pidato Sekjen PDIP, Pramono Anung W., 31 Mei 2006, <http://indonesia-berjuang.blogspot.com/>

disebutkan bahwa fungsi partai merupakan “sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa.” Selanjutnya pada ayat 4 dinyatakan bahwa fungsi partai adalah “menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.”

Memang setiap elit parpol berkeyakinan bahwa partainya merupakan sarana mencapai cita-cita sosial dimana ideologi menjadi pijakan dasar untuk bergerak. Misalnya saja Megawati, ia berpandangan bahwa “partai adalah alat perjuangan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dalam mencapai cita-cita yang sudah ditetapkan pendiri bangsa melalui konstitusi negara. Bukan sebaliknya, yakni bahwa rakyat, bangsa, dan negara dijadikan alat untuk kepentingan partai. Itulah salah satu unsur pokok etika politik yang perlu terus kita pupuk, kita kawal, dan kita budayakan dalam PDI Perjuangan, sebagai bukti konsistensi terhadap ideologi partai yakni Pancasila 1 Juni 1945.” Demikian halnya dengan PK Sejahtera yang menganggap bahwa partai merupakan sarana dakwah didalam melakukan pembinaan umat.

“Pertama sebagai amal dakwah, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh PKS berkaitan dengan bagaimana melakukan pengajaran terhadap umat, pembinaan umat dan pemberdayaan serta pendayagunaan umat. Dan tentu saja program ini secara khusus ditujukan kepada umat Islam, karena programnya adalah program yang sifatnya adalah program seperti majelis taklim, pengajian rutin, dan program - program keagamaan; Kedua adalah aktivitas sosial - kemasyarakatan yang tentu saja ini terbuka bagi siapapun, segmentasi yang ada sesuai dengan kebutuhan, itu yang banyak kami lakukan dalam aksi-aksi penanganan bencana misalnya.”⁷¹

Hal ini menegaskan bahwa kedua partai memposisikan negara sebagai kekuatan otonom yang memiliki peran sentral untuk membangun masyarakatnya. Artinya, negara perlu memiliki kemampuan mengatur warga negaranya secara luas. Negara bagi PK Sejahtera merupakan sarana dakwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Atas dasar keinsyafan itulah Dewan Pimpinan Pusat PK Sejahtera memiliki tugas konsepsional, struktural, manajerial, dan operasional⁷² - demi mencapai tujuan dan sasaran partai ia menggunakan sarana dan prasarana yang diatur dalam Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga,

“Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

⁷¹ Wawancara, Mahfudz Sidiq, Ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PK Sejahtera, tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI Lt. 3 Jakarta

⁷² Pasal 14-17, Anggaran Rumah Tangga PK Sejahtera.

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahannya.
2. Ikut serta dalam lembaga - lembaga pemerintahan, badan - badan penentu kebijakan, hukum dan perundang - undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.”

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh partai, kedaulatan anggota PK Sejahtera diatur sedemikian rupa melalui permusyawaratan (pemilu raya), dimana kader hanya bisa memilih anggota Majelis Syuro untuk kemudian Majelis Syuro yang menentukan segala sesuatunya. Jadi berdasarkan sifat dan orientasinya, PK Sejahtera merupakan *patronage party* pada kadar tertentu, sekaligus *programmatic party* dalam beberapa aspek. Hal ini terungkap dari keterangan Mahfudz Sidiq,⁷³

“sebagai partai kader, prinsip keterbukaan itu tidak kemudian menjadikan kami mengabaikan atau tidak memperdulikan prinsip-prinsip partai kader itu. Artinya apa, siapapun boleh bergabung dengan PKS tetapi siapapun yang bergabung dengan PKS – dia juga harus ikut, dia harus punya komitmen dan konsistensi didalam mengikuti seluruh mekanisme pengkaderan yang ada. Tentu saja akan ada special treatment ya, misalnya, cabang-cabang partai yang ada di kawasan - kawasan penduduk mayoritas non Muslim seperti di NTT, di Papua atau beberapa tempat yang lain, maka kami terbuka bagi orang non Muslim itu menjadi anggota partai tetapi ada suatu treatment yang khusus bahwa proses kaderisasi yang harus mereka ikuti adalah yang wajib, yang harus itu adalah kaderisasi kepartaian. Artinya, manajemen organisasi, tentang aturan organisasi, visi misi organisasi tetapi program-program dan proses pengkaderan yang lebih khusus yakni tentang pembinaan kepribadian sebagai seorang muslim, mereka tidak ikut dan sifatnya pilihan saja bagi mereka. Nah ini yang kami lakukan, sehingga tidak ada benturan antara sifat terbuka dengan sifat partai kader.”

Dalam hal ini PK Sejahtera bisa diklasifikasikan sebagai *programmatic party* yang cenderung mengadopsi *patronage party*. Menurut Miriam Budiardjo, *patronage party* memiliki organisasi nasional yang kendor, disiplin yang lemah, dan maksud utamanya adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya; Kenyataan ini dilakukan oleh PK Sejahtera dalam beberapa PILKADA ataupun penempatan personalia pengurus di daerah yang berpenduduk mayoritas non Muslim. Sedangkan *programmatic party* mempunyai pandangan hidup sebagaimana yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat

⁷³ *Loc. Cit.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007.

dan mengikat. Hal ini berlaku dan diterapkan secara umum oleh PK Sejahtera sebagai implementasi kebijakan dari partai kader.

Demikian pula dengan PDI Perjuangan, ia menempatkan negara sebagai kekuatan otonom yang memiliki peran sentral untuk membangun masyarakat Pancasila seperti dinyatakan dalam Mukadimah AD/ART,

“Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan sebagaimana termaktub didalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. ... Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader bangsa.”

Kalaupun kedua partai memiliki perbedaan pada tataran ide, cita - cita sosial dan metode - bukan berarti menjadi eksklusif. Bahkan upaya mencari persamaan diantara beragam dimensi perbedaan tetap mewarnai kebijakan masing - masing partai. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa negara merupakan kekuatan otonom untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, sangat terbuka untuk kerjasama antar partai (koalisi). Kesamaan platform memang menjadi acuan utama dalam mengagregasi kepentingan masyarakat. PDI Perjuangan misalnya, ia menetapkan persamaan persepsi dan pandangan terhadap problem kebangsaan sebagai tolak ukur koalisi antar parpol. Menurut Soewarno, “setidak-tidaknya ada 3 prinsip minimum yang harus disepakati yaitu pro-Pancasila, pro-NKRI dan pro-UUD 1945. Sekarang dikembangkan lagi menjadi pro terhadap Anggaran Belanja yang pro-rakyat.” Sedangkan PK Sejahtera menurut Mahfudz Sidiq, “PKS telah menegaskan bahwa visi perjuangan PKS adalah mewujudkan masyarakat yang Islami di negeri Indonesia dengan parameter kemakmuran, parameter keadilan dalam bingkai NKRI.” Artinya, meskipun kedua parpol memiliki perbedaan ideologi cukup mendasar tetapi tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan demikian, perbedaan ideologi merupakan bagian dari fungsi parpol dalam mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi dan kebutuhan warga negara – jadi mereka tetap menjalankan peranan integrasi nasional.

Fungsi agregasi dan artikulasi dari kedua parpol bisa diulas dari perbedaan yang melekat dalam diri mereka. Sekilas memang tidak tampak ada perbedaan prinsipil diantara keduanya, kecuali metode didalam upaya memperoleh kekuasaan politik. Perbedaan ide dan cita - cita sosial sangat nyata ketika PK Sejahtera memberikan definisi tentang nasionalisme,

“PKS mengartikan nasionalisme itu lebih kepada semangat untuk bertanggungjawab terhadap nasib - masa depan bangsa dan negara. Wujud nasionalisme itu bukan sebatas pada sentimen-sentimen sempit, kebanggaan-kebanggaan person tetapi bagaimana ada peran-peran nyata yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat - setiap warga negara sebagai wujud tanggungjawab dirinya terhadap kondisi kekinian dan juga masa depan kehidupan bebangsa dan bernegara.”⁷⁴

PDI Perjuangan yang mendedikasikan diri sebagai partai tengah (nasionalis), ternyata mempunyai pandangan yang jauh berbeda dengan PK Sejahtera soal nasionalisme. Hal ini tercermin dari ungkapan Pramono Anung berikut ini,

“PDI Perjuangan adalah partai yang ada ditengah - mengusung masalah kebangsaan, nasionalisme, pluralisme ditambah dengan frame lainnya sebagai partai yang berideologi Pancasila. Dan menjadi dasar kerangka berfikir PDI Perjuangan bahwa menjaga keutuhan itu merupakan hal paling utama. Bahwa ada tarikan primordialisme merupakan kekayaan daerah yang tidak boleh dihilangkan tetapi tetap harus berfikir bahwa itu harus menjadi satu kesatuan dari unity sebuah negara kepulauan. Oleh karena itu harus mulai kembali dibicarakan mengenai ideologi yang mempersatukan kita yaitu ideologi Pancasila.”⁷⁵

Ketika diperhatikan secara lebih serius, ternyata pemilihan dasar agama tidak semata - mata karena fanatisme para pendiri masing - masing partai. Ada juga alasan - alasan praktis. Salah satu alasan paling praktis bagi parpol primordial ialah bahwa agama apapun bisa dengan mudah menyatukan pendukungnya - lebih merupakan *politics of identity* kedalam suatu struktur kepartaian. Kenyataan ini tampak dari pernyataan Tifatul Sembiring selaku Presiden PK Sejahtera pada tanggal 26 Maret 2007 - menjelang PILKADA DKI Jakarta.⁷⁶ “Soal nasionalis, PKS lebih nasionalis. Kami mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berjuang untuk kemajuan negara ini sepanjang waktu untuk memajukan NKRI” tandasnya ketika ada anggapan bahwa PK Sejahtera mengancam keutuhan NKRI. Ia menambahkan bahwa “Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah murni partai nasionalis yang menjalankan konstitusi negara dan mengikuti segala aturan permainan yang telah ditetapkan.” Menurut dia, “PKS adalah partai nasionalis yang berketuhanan ... PKS menolak nasionalisme yang tidak jujur, yang sekuler dan tidak beriman ... PKS sangat menghormati prinsip - prinsip civil society, menghormati dan menghargai perbedaan dan sangat menghargai pluralitas yang ada di negeri Indonesia.”⁷⁷ Demikian pula dengan Fahry Hamzah selaku Wasekjen DPP PK Sejahtera, “PKS dicap

⁷⁴ *Ibid.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007

⁷⁵ *Loc. Cit.*, Pramono Anung, tanggal 25 September 2007.

⁷⁶ lihat Tifatul Sembiring, *PKS Murni Nasionalis*, PK Sejahtera-Online, 23 Maret 2007.

⁷⁷ PKS membedakan antara pluralitas dengan pluralisme, pluralitas berarti masing-masing boleh berbeda, tapi harus saling menghargai. Sedangkan pluralisme dinilai cenderung menyamakan perbedaan dan tidak menekankan unsur saling menghargai. Media Indonesia, 05 April 2007

partai sektarian yang anti nasionalis. Ini pandangan sempit. Bukankah kita semua telah sepakat bahwa Pancasila final sebagai ideologi negara dan otomatis menjadi ideologi semua ormas dan parpol.”⁷⁸

Dengan begitu, baik PDI Perjuangan sebagai partai kebangsaan maupun PK Sejahtera sebagai partai Islam tetap menjalankan peranan integrasi nasional. Kalau pun orientasi program dari kedua partai terdapat perbedaan cukup mendasar, tetapi kedua partai tetap bisa menjadi sarana pengatur konflik dengan mengagregasi dan mengartikulasikan perbedaan kepentingan karena keduanya memandang negara sebagai kekuatan otonom didalam mengatur warga negara.

IV.5. Peran PDI Perjuangan dan PK Sejahtera Terhadap Integrasi Nasional.

Kendati reformasi dibarengi dengan melemahnya “lembaga-lembaga aktor” yang dapat mengakibatkan negara pada posisi labil - ditambah dengan suatu kenyataan bahwa diantara parpol tidak ada persamaan platform atas masa depan negara nasional. Namun secara mendasar kedua parpol tetap menghendaki masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Meskipun formula kebijakan yang diterapkan oleh setiap parpol dalam mengatasi permasalahan bangsa memiliki perbedaan pendekatan. Hal ini memang dapat melahirkan fragmentasi dukungan berdasarkan loyalitas primordial. Hal semacam ini masih muncul karena terdapat perbedaan tafsir terhadap Pancasila sebagai konsensus sebagaimana diungkapkan oleh Soewarno,⁷⁹

“Untuk menentang Pancasila secara terang-terangan tidak mungkin. Jadi mereka pun ngomong Pancasila tetapi sebenarnya anti Pancasila. Sehingga timbul dua kelompok besar yaitu kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Jadi, jika sudah bersatu tidak perlu Pancasila lagi. Masuk kedalam kelompok ini adalah PKI; Sedangkan kelompok kedua dipelopori oleh Masyumi / PSI yang menyatakan bahwa Pancasila itu pluralisme. Memang Pancasila itu Bhinneka tapi tidak boleh dilupakan bahwa ia juga Tunggal Ika. Masyumi / PSI menafsirkan Pancasila hanya Bhineka.”

Walaupun demikian upaya parpol didalam memperkokoh integrasi nasional tidak berarti terhenti, sebab ia terus menjalankan peranannya sebagai sarana sosialisasi, komunikasi, rekrutmen politik dan pengatur konflik sebagaimana dideskripsikan oleh Miriam Budiardjo.⁸⁰ Dengan menjalankan fungsinya sebagai parpol, ia bisa melakukan

⁷⁸ Kompas, 05 April 2007.

⁷⁹ *Loc. Cit.*, Soewarno, tanggal 13 September 2007.

⁸⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal 17-19.

penguatan tentang hak-hak warga negara, karena era reformasi bisa memberikan jaminan kedaulatan bagi parpol untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional sehingga memberikan manfaat kepada anggotanya, baik idiil maupun materiil sebagai bentuk kebijaksanaan secara umum.

Artinya, walaupun PDI Perjuangan dan PK Sejahtera pada tingkat platform terjadi perbedaan namun sepanjang upaya mengimplementasi platform dilakukan secara damai – ia tetap bisa menjalankan peranan integrasi nasional. Tentu saja dengan catatan, selama para elit parpol cukup akomodatif terhadap pluralitas dan persuasif dengan agenda yang mereka usung, setidaknya sampai aspek integrasi horisontal cukup kondusif. Dalam hal ini, PK Sejahtera maupun PDI Perjuangan dapat memenuhi kualifikasi tersebut. Memang keduanya akan selalu berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan akibat dari perbedaan platform dan metode.⁸¹ Hal itu tidak lepas dari hakekat parpol sebagaimana dikemukakan oleh Carl J. Friedrich.⁸²

Persoalan yang muncul kemudian bagaimana menjamin stabilitas politik nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebab menurut Myron Weiner dan Joseph La Palombara,⁸³ demokratisasi didalam suatu negara akan melipatgandakan parpol termasuk dengan loyalitas - loyalitas yang anti nasional sekalipun. Dengan begitu, sistem multi partai bagi nation state yang demokratis tidak dapat memberikan jaminan bagi terciptanya stabilitas politik dimana ketahanan nasional dipertaruhkan. Hal semacam ini amat terasa pengaruhnya di Indonesia, dimana pemilu dengan sistem multi partai tidak menghasilkan partai dominan. Realitas ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang amat heterogen, baik dari segi etnis, agama, termasuk wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Yang dapat dilakukan pada kondisi demikian adalah berusaha menggabungkan corak kebudayaan yang berbeda - beda dari masyarakat minoritas kedalam semacam kebudayaan “nasional” dengan tujuan untuk menciptakan loyalitas nasional tanpa menghilangkan kebudayaan - kebudayaan yang lebih kecil. Sehingga “*Bhineka Tunggal Ika*” perlu lebih dikongkritkan kedalam kenyataan hidup sehari - hari. Disinilah arti penting peranan parpol terhadap integrasi nasional.⁸⁴ Walaupun dukungan terhadap

⁸¹ Sigmund Neumann, *Modern Political Parties*, in *Comparative Politics: a Reader*, Harry Eckstein and David E. Apter (eds), London: The Free Press of Glencoe, 1963, hal. 352.

⁸² Carl J. Friedrich, *Constitution Government and Democracy: The Theory and Practice In Europe Of Citizens More or Less Organized*, Blaisdell Publishing Company 1967, page 419.

⁸³ *Ibid*, Miriam Budiardjo, 1998:195-198.

⁸⁴ Lihat, Burhan Djahir Magenda, *National Integration in A Complex Indonesia*, TELSTRA No. 64 Januari-Februari 2001.

parpol bersangkutan amat menentukan. Sebab stabilitas politik dapat dijalankan dengan baik bila terdapat parpol dominan - setidaknya koalisi yang lebih permanen.

Kemungkinan timbulnya satu partai dominan demi menjamin stabilitas politik agar terwujud ketahanan nasional sangat tergantung pada sifat dan luasnya perpecahan yang ada. Dengan begitu perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan - perbedaan agama, perpecahan etnis, perpecahan antara kelompok tradisional dan kelompok modern, pertentangan antara perkotaan dan pedesaan, dan termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Semua itu dapat diintegrasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional dimana sifat dan watak dari parpol yang mengintegrasikan perbedaan akan menentukan peranannya bagi ketahanan nasional. Untuk menjawab hal ini, kiranya hasil penelitian dari Lingkaran Survei Indonesia pada Juli 2007 dapat memberikan gambaran bahwa partai-partai sekuler (netral agama) tetap memperoleh tempat dominan ditengah - tengah masyarakat, lihat Tabel IV.2. dibawah ini.⁸⁵

Tabel IV.2. Distribusi Pemilih Partai Politik Pada Juli 2007.

KATEGORI	PPP	DEMOKRAT	PAN	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	Tidak tahu / Tidak Menjawab / Rahasia / Belum Memutuskan
Wilayah Desa – Kota (%)								
Desa	3,7	16,0	2,8	4,7	4,0	24,9	17,4	24,6
Kota	3,6	16,7	4,3	4,7	7,9	19,1	15,3	24,6
Jenis Kelamin (%)								
Laki-laki	3,4	15,6	3,2	4,9	6,5	23,9	15,0	25,5
Perempuan	3,9	17,0	3,6	4,6	4,7	21,2	18,1	23,7
Agama (%)								
Islam	4,3	19,4	3,9	5,5	6,4	20,6	16,9	24,8
Kristen /	0,0	25,2	0,7	0,0	1,4	32,1	12,2	26,1
Hindu	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	35,2	22,3	16,9
Budha	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0	10,6	14,9	29,8
Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	20,4	0,0
Pulau (%)								
Jawa	4,9	12,5	3,1	7,3	7,0	23,3	14,9	24,9
Non-Jawa	1,8	21,8	3,8	1,0	3,7	21,5	18,8	24,3
Suku (%)								
Jawa	3,7	16,1	3,3	9,0	2,6	26,6	13,0	24,6
Sunda	6,0	6,5	1,8	1,9	16,2	21,5	23,0	20,1
Melayu	2,5	24,8	4,5	0,0	0,0	28,3	12,8	22,5
Madura	11,4	18,2	0,0	13,6	4,6	13,6	6,8	27,3
Bugis	2,8	24,6	3,0	0,0	15,0	3,3	42,7	3,0
Betawi	3,9	15,4	7,7	0,0	7,8	0,0	11,6	41,9
Batak	0,0	38,9	13,6	0,0	4,4	17,9	4,5	16,2
Minang	0,0	13,9	6,5	2,1	4,8	6,5	24,6	39,6

⁸⁵ Sumber: Cupli Risman, 2007.

Lainnya	1,8	19,9	3,5	1,0	2,8	24,1	16,7	27,3
---------	-----	------	-----	-----	-----	------	------	------

Bila komposisi pemilih kedua partai dibandingkan, ternyata pemilih PDI Perjuangan mayoritas berada di pedesaan, dan sebagian besar berlatar belakang non Islam serta banyak berasal dari etnis Jawa, Sunda, Melayu. Walaupun PK Sejahtera memiliki simpatisan Kristen akan tetapi prosentasenya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan partai nasionalis (netral agama). Perbandingan dari aspek geografis, antara Jawa dan Luar Jawa, sebaran konstituen dari kedua partai cukup representatif. Kedua partai memiliki pendukung di semua kelompok etnis, walaupun menurut hasil survei, etnis Betawi tidak mendukung PDI Perjuangan. Dengan demikian, kedua partai dapat berperan aktif dalam memperkuat integrasi nasional. Tentu saja bila kedua parpol menjalankan fungsinya secara optimal. Bagaimanapun integrasi nasional bukan hanya masalah elit dengan massa, demikian halnya dengan integrasi teritorial bukan sekedar persoalan wilayah. Menurut Nazaruddin, dalam masalah teritorial sekalipun terdapat dimensi elit dengan massa yang bisa timbul sebagai faktor dominan. Demikian pula dalam konteks wilayah, karena mereka yang digolongkan massa dalam aspek nasional, bisa menjadi kelompok elit didalam dan oleh masyarakat setempat, khususnya didalam kelompok primordial tertentu.⁸⁶

Dalam hal ini dominasi atas kekuasaan politik hanya dapat terjadi pada suatu kondisi ketika satu parpol memenangkan pemilu secara mutlak. Karena hanya dengan begitu partai - partai lain meskipun melakukan koalisi antar partai tidak bisa menggoyahkan posisi partai pemenang. Sehingga parpol pemenang dapat menjalankan program - programnya sebagai kebijakan nasional tanpa resistensi yang berarti dari parpol oposisi. Harapan semacam ini menjadi impian para elit parpol tetapi amat sulit diwujudkan ditengah heterogenitas bangsa dengan sistem pemilu multi partai. Harapan agar PDI Perjuangan menjadi partai dominan misalnya, tercermin dari ungkapan Guruh,⁸⁷

“Idealnya PDIP harus mampu memosisikan diri sebagai suatu kekuatan potensial dan bisa merebut kekuasaan sehingga menjadi lebih leluasa mengatur negara ini. ... Dan melanjutkan jejak Bung Karno melakukan revolusi Indonesia yang terputus dizaman Orde Baru. Nah mestinya itu dilakukan lagi oleh PDIP.”

Memang keberadaan partai dominan yang mutlak bukan tanpa konsekuensi ditengah -- tengah transisi demokrasi, sebab bisa menimbulkan otoritarianisme baru.

⁸⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1989, hal. 4.

⁸⁷ *Loc. Cit.*, Guruh Soekarnoputra, tanggal 06 Oktober 2007.

Artinya, transisi demokrasi tetap membutuhkan parpol yang kuat sekaligus dapat meningkatkan kekuatan masyarakat sipil atas negara secara bersamaan – dimana kekuatan negara dan masyarakat berimbang. Hanya dengan begitu masyarakat sipil dapat memaksa kekuatan negara agar berpihak kepada kepentingan mereka.

Jadi nasib parpol dan nasib bangsa secara keseluruhan sangat terkait, dimana masa depan bangsa merupakan hasil watak politik dari parpol. Bagaimanapun parpol bersifat politik bukan hanya karena mengejar kekuasaan politik, akan tetapi lebih daripada itu, parpol bersifat politik karena memenuhi fungsi-fungsi politik untuk berintegrasi.⁸⁸ Partai agama sekalipun menjalankan fungsi politik untuk berintegrasi selama upaya meraih kekuasaan mengikuti aturan main negara bersangkutan. Taruhlah PK Sejahtera,

“Jadi kalau dilihat dari doktrin dakwah PKS, bahwa *Mahaliyah wa Alamiyah*, kami mengakui fakta-fakta atau kondisi-kondisi lokal meskipun tidak boleh terlepas dari dunia internasional karena kita hidup dalam suatu sistem global. Sehingga bagi PKS, negara Indonesia itu adalah suatu negara yang diakui keberadaannya oleh PKS. Jadi kami tidak memisahkan diri atau tidak menjadi satu sparasi dari negara Indonesia ini. Nah, mengenai berbagai macam model dan type yang ada didalamnya, tentu kami mengikuti, yang penting adalah bahwa negara Indonesia ini keutuhannya tetap terjaga. ... Indonesia dengan batas-batas yang ada merupakan bagian yang kami akui, dan kami merupakan bagian didalamnya.”⁸⁹

Artinya, PK Sejahtera dapat menjalankan peran integrasi nasional karena memenuhi dimensi integrasi vertikal dari James J. Coleman dan Carl G. Rosberg. Integrasi vertikal adalah integrasi politik antara negara dengan masyarakat, khususnya anggota / kader dan simpatisan. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa PK Sejahtera merupakan parpol kontestan pemilu selama 2 kali, dengan perolehan suara 7,34% secara nasional pada pemilu 2004. Artinya, selain bersifat nasional – hal ini menunjukkan bahwa PK Sejahtera mempunyai konstituen yang tersebar secara nasional. Demikian halnya dengan PDI Perjuangan. Disamping itu, mereka dapat menjembatani celah perbedaan yang mungkin terjadi antara elit dengan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Kenyataan itu tampak dari pola pembinaan kader yang dilakukan oleh PK Sejahtera. Menurut Ahmad Zainuddin,⁹⁰ PK Sejahtera memiliki 2 model pembinaan: *pertama*, pembinaan yang muaranya kepada

⁸⁸ Miriam Budiardjo, (Ed), *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981, hal. 61.

⁸⁹ *Loc.Cit.*, Untung Wahono, tanggal 02 Oktober 2007.

⁹⁰ *Loc.Cit.*, Ahmad Zainuddin, tanggal 20 Agustus 2007.

partai; *kedua*, pembinaan kader yang muaranya kepada pembinaan bangsa, pembinaan umat, pembinaan kehidupan umat manusia.

Namun, karena PK Sejahtera adalah partai yang berdasarkan agama, menjadi lebih sulit untuk menciptakan integrasi dari aspek kultural atau integrasi horisontal. Sebab integrasi kultural akan tercapai dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sementara stabilitas politik selama proses integrasi kultural tersebut berlangsung tidak cukup terjamin akibat kondisi internal negara yang amat heterogen dari aspek budaya dan etnis, ditambah dengan sistem multi partai yang berlangsung. Kecuali tujuan dakwah dari PK Sejahtera tercapai secara sempurna atau menjadi lebih akomodatif terhadap pluralitas disegala lini. Kesulitan semacam ini tidak hanya dialami oleh PK Sejahtera, tetapi juga terjadi pada PDI Perjuangan sebagai partai terbuka yang menawarkan opsi - opsi nilai kebangsaan. Akan tetapi, kesulitan PDI Perjuangan justru sudah dimulai dari internal mereka sendiri. Terutama ketika ia menawarkan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai jatidiri dan platform perjuangan partai. Maksudnya, tantangan terhadap peranan PK Sejahtera dalam memperjuangkan integrasi horisontal bersumber dari eksternal parpol, berbeda halnya dengan PDI Perjuangan yang banyak dipengaruhi faktor internal.

IV.6. Peran Partai Politik Era Reformasi Terhadap Ketahanan Nasional.

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia menyaksikan pecahnya berbagai konflik dari suatu *nation-state* dimana konflik seringkali memunculkan isu *self - determination*, konflik negara - masyarakat, atau konflik antar etnis dalam masyarakat yang majemuk. Isu etnisitas dan sejenisnya sering muncul sebagai tameng keinginan para elit politik untuk memonopoli wilayah, sumber - sumber kehidupan dan kekuasaan.⁹¹ Penggunaan isu - isu primordial menjadi sarana elit politik. Efektifitas penggunaan isu primordial sebagai sarana politik di kawasan Asia dan Afrika muncul akibat dari pembentukan negara yang belum sempurna serta warisan kolonialisme yang membentuk negara tanpa pertimbangan keragaman didalam masyarakat.⁹² Memang tidak dapat dipungkiri bahwa proses dekolonisasi telah mampu membebaskan banyak bangsa dari cengkeraman kolonialisme. Walaupun dekolonisasi bisa juga mengekang aspirasi mandiri bangsa - bangsa tertentu melalui penjara administratif - geografis baru (negara) akibat

⁹¹ Lihat Burhan Djahir Magenda, *Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Proses Integrasi Nasional*, (Makalah) Pidato Ilmiah di APDN Mataram, 1986.

⁹² Syamsul Hadi dan Andi Widjajanto, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: CIREs FISIP UI berkejasama dengan Yayasan Obor, 2007, hal. 1.

pembentukan negara pasca kolonial yang lebih didasarkan pada wilayah administrasi ekonomi negara kolonial daripada batas - batas komunitas masyarakat yang relevan.⁹³ Maksudnya, etno - nasionalisme masih tumbuh subur sebagai warisan kolonial. Karena kolonialisme tidak pernah mempertimbangkan heterogenitas etnis dan budaya dalam melakukan penjarahan ekonomi – padahal koloni yang merekajarah secara ekonomi itulah yang kemudian melahirkan *nation state*.

Kenyataan itu koheren dengan pembentukan Indonesia sebagai *nation-state* yang didasarkan pada persetujuan bersama dari berbagai kelompok. Suatu persetujuan yang digerakkan oleh penderitaan kolektif akibat dari kolonialisme. Pengalaman kolektif itu kemudian melahirkan nasionalisme untuk merebut kemerdekaan dan bersatu membentuk suatu negara. Suatu realitas yang coba direkonstruksi kembali oleh PDI Perjuangan dalam rangka membangun *nation and character building*. Sebab pasca lengsernya Presiden Soeharto, mulai muncul berbagai fenomena konflik lokal yang eskalasinya semakin mengkhawatirkan. Fenomena tersebut muncul akibat ketidaksiapan Indonesia dalam melaksanakan proses demokratisasi, terutama karena struktur sosial negara tidak cukup mampu mengantisipasi dinamika yang lahir dari proses demokratisasi.

Bertolak dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang menapaki transisi demokrasi itulah Megawati selaku Ketua Umum memberikan koreksi atas demokrasi yang sedang berlangsung di tanah air ketika membuka HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari 2007:

”Kita seharusnya sudah dapat maju ke demokrasi substantif yakni demokrasi yang berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Demokrasi bagi kita adalah demokrasi yang memiliki watak, ciri, dan kepribadian Indonesia yaitu Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengakui kebebasan berpendapat dan berbicara dalam koridor etika, moral, dan norma-norma sosial yang dilandasi jati diri dan kepribadian bangsa; mengutamakan kedaulatan negara; kepentingan rakyat banyak, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.”⁹⁴

Megawati menilai bahwa demokrasi yang sedang berlangsung kini sudah keluar dari koridor ke-indonesia-an, bahkan sangat jauh dari cita-cita nasional. Pandangan Megawati atau pergeseran paradigma PDI Perjuangan ini bertolak dari kesadaran konservatif yang bertumpu pada nilai - nilai tradisionalisme. Akan tetapi sebaliknya, PK Sejahtera berpandangan amat optimis dengan reformasi yang berlangsung di tanah air ketika

⁹³ *Ibid*, Syamsul Hadi dan Andi Widjajanto, 2007 : 11.

⁹⁴ Pidato Megawati pada HUT ke-34 PDI Perjuangan, <http://www.korwilpdip.org/17PIDATOMEGA100107.htm>

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

peneliti mewawancarai ketua Bidang POLHUKAM DPP PK Sejahtera mengenai euforia politik yang sedang berlangsung. Kejadian aktual yang mendera Indonesia saat ini menurut Untung Wahono masih wajar. Ia berpendapat,

“Sebenarnya dalam suatu proses perubahan, wajar terjadi hal - hal yang tidak normal, dimanapun. Khusus reformasi di Indonesia, saya kira ketidak normalan - ketidak normalan yang mengiringi perubahan pasca reformasi itu masih dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu arah dari perubahan itu. ... Karena proses perubahan itu pasti meninggalkan unsur - unsur lama dan memunculkan unsur - unsur baru, sedangkan unsur - unsur lama tidak sepenuhnya rela dengan adanya perubahan. Sehingga bisa saja ia menghentikan perubahan itu, salah satu diantaranya melahirkan disintegrasi untuk memberikan citra buruk bagi kekuatan yang baru atau pengaruh yang baru. ... Jadi, untuk proses reformasi yang sekarang ini, saya kira masih dalam batas wajar meskipun bisa dikatakan bahwa perubahan itu tidak terlalu mulus tapi itu sesuatu hal yang sangat wajar.⁹⁵

Pandangan senada dikemukakan oleh Guruh Soekarnoputra. Ia menilai bahwa proses perubahan yang sedang dialami oleh Indonesia masih dalam batas yang wajar meskipun tidak bisa dipisahkan dari kesalahan rezim terdahulu. Bagaimana pun Indonesia terus berproses, hal mana tidak bisa dilepaskan dari kondisi sebelumnya.

“Sebagai bangsa masih terus berproses. Dan sampai dewasa ini apa yang kita rasakan - yang kita lihat tentu merupakan bagian dari proses - dari proses sebelumnya. Artinya, merupakan satu mata rantai aksi reaksi. Demikian juga dengan masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari kejadian - kejadian sebelumnya, terutama semasa Orde Baru sebagai suatu era yang memporak - porandakan segala sesuatu, dalam hal ini juga termasuk salah satu pondasi - fundamen dari negara yang telah ditata oleh Bung Karno. Dengan dinamikanya sendiri Bung Karno memimpin revolusi kemerdekaan dan seterusnya, dimana negara ini terus berproses. Dan Bung Karno sudah mempunyai konsep untuk membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building. Namun ketika proses itu sedang berlangsung terjadi apa yang namanya semacam “penjegalan” dengan munculnya Gestok. Untuk kemudian Bung Karno dijatuhkan sampai muncul era Orde Baru dibawah rezim Soeharto. Dan hal itu menurut saya, sengaja atau tidak sengaja, telah memporak - porandakan segala sesuatu yang sudah ditata dan akibatnya sampai hari ini. Dimana semasa Orde Baru ada massa mangambang - disamping suatu era yang menjadikan rakyat takut berpolitik. Jeda waktu selama 32 tahun itu kan beberapa generasi, jadi sekarang masyarakat kita itu mengalami suatu era ibarat “layang - layang putus dari talinya”, tidak terarah. Apalagi pemerintah tidak punya konsep untuk mengarahkan mereka. Ia tidak memiliki konsep disegala bidang, terutama dibidang pendidikan. Sehingga generasi baru sebagai generasi penerus mengalami keterputusan. Inilah gambaran ketika segala sesuatu tidak mempunyai konsep yang jelas, ataupun kalau kelihatan jelas tapi ngak mantab karena pijakannya

⁹⁵ Wawancara Ir. Untung Wahono, Msi, Ketua Bidang POLHUKAM DPP PKS, tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI Lt 4 - Jakarta

itu ngak solid dan ngak jelas. Padahal pijakan itu Pancasila, platformnya adalah Pancasila akan tetapi tidak diimplementasikan.”⁹⁶

Korelasi antara integrasi nasional dengan euforia politik yang mengarah pada gejala disintegrasi akibat percepatan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Robert D. Kaplan berpendapat bahwa,⁹⁷ fenomena konflik lokal cenderung terjadi ketika ada upaya eksternal dan internal yang mempercepat proses demokratisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, M. Jawhar Hasan mengkaitkan proses demokratisasi dengan stabilitas dari suatu negara.⁹⁸ Dia menarik kesimpulan dari proses demokratisasi di Asia Tenggara yang cenderung tidak stabil karena dua alasan: *pertama*, ledakan partisipasi rakyat tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada; *kedua*, ketidak mampuan negara untuk menerapkan prinsip *good governance*. Dalam hal ini Untung Wahono lebih sependapat dengan pandangan Jawhar Hasan, ia menyatakan.

“Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah Indonesia, kasus - kasus kekerasan, kasus - kasus disintegrasi, itu bukan barang baru. Ketika berubah dari sistem serikat menjadi negara kesatuan juga meninggalkan kejadian - kejadian yang terkait dengan sparatisme dan kekerasan, pemberontakan - pemberontakan juga pernah terjadi.”⁹⁹

Dengan demikian, peranan parpol sebagai institusi politik amat penting bagi penyelesaian berbagai permasalahan nation state dalam rangka integrasi nasional. Sebab parpol dapat menjadi institusi aktif dalam mewujudkan *nation and character building*, sekaligus bisa menjadi aktor aktif dalam penyelenggaraan *state building* agar tercapai *good governance*. Artinya, peranan parpol era reformasi terhadap ketahanan nasional dalam konteks transisi demokrasi terletak pada Pancagatra yaitu: IPOLEKSOSBUD dan HANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan). Hal ini terkait dengan fungsi parpol sebagai sarana sosialisasi, komunikasi, pengatur konflik, dan rekrutmen politik. Dengan fungsi sosialisasi dan komunikasinya, parpol dapat melakukan transformasi nilai yang amat penting bagi pemahaman ideologi, politik dan budaya untuk kemudian melahirkan pranata sosial yang lebih menginternalisasi nilai - nilai nasional. Transformasi nilai amat penting bagi parpol dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik dan pengatur konflik. Karena pada kondisi inilah parpol diharapkan

⁹⁶ Wawancara dengan Guruh Soekarnoputra, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, pada tanggal 06 Oktober 2007 di Jl. Sriwijaya Raya No. 26 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan.

⁹⁷ Robert D. Kaplan, *The Coming of Anarchy: Shattering Dreams of the Post Cold War*, New York: Vintage Books, 2007.

⁹⁸ Mohamed Jawhar Hasan, “The Nexus Between Democracy and Stability: The Case of Southeast Asia”, dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 18 No. 2, September 1996.

⁹⁹ Wawancara Ir. Untung Wahono, Msi, Ketua Bidang POLHUKAM DPP PKS, tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI It 4 - Jakarta

bisa berperan sebagai sarana artikulasi dan mengagregasi kepentingan warga negara, termasuk peranan mereka dalam menentukan regulasi masalah IPOLEKSOSBUD dan HANKAM melalui kader - kadernya yang ada di badan legislatif dan eksekutif.

Peranan parpol era reformasi bisa dimaknai sebagai ikhtiar mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab, dimana didalamnya terdapat harmoni sosial, toleransi, penghormatan terhadap HAM, tegaknya tertib sosial, partisipasi politik masyarakat yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, civil society, keadilan sosial – hal ini semua tercermin dari terwujudnya Pancagatra dari Hastagatra. Jadi ketahanan nasional dapat terwujud bila terdapat masyarakat politik (*political society*) yang menginternalisasi dan mengimplementasikan prinsip - prinsip demokrasi dalam kehidupan negara nasional untuk mewujudkan ketahanan nasional. Karena hal paling penting dari demokrasi menurut Pramono Anung adalah,

“bahwa semua harus diatur berdasarkan aturan main demokrasi. Demokrasi harus mampu memberikan prosperity, sebab jika dibandingkan dengan negara - negara yang tidak menjalankan demokrasi secara penuh, ternyata economic growth mereka lebih bagus daripada Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak boleh tergoda untuk kembali ke rezim otoritarian. Dengan begitu pembangunan - system building terhadap demokrasi harus tetap dilanjutkan.”¹⁰⁰

Artinya, transisi demokrasi yang kini sedang berlangsung membutuhkan peranan parpol secara masif dalam rangka membangun dan mengkonsolidasikan sistem politik pada skala nasional. Sedangkan untuk membangun dan mengkonsolidasikan sistem politik di era transisi demokrasi menurut Huntington dapat dilakukan langkah - langkah sebagai berikut,¹⁰¹ *Pertama*, melakukan pergantian pejabat pro - otoritarianisme dengan pejabat yang baru; mencabut undang - undang yang tidak demokratis; menghapus badan - badan otoritarian; penanganan hak asasi manusia; pengurangan keterlibatan militer dalam politik. *Kedua*, mencegah persoalan kontekstual, seperti separatisme, konflik komunal, antagonisme regional, kemiskinan, ketimpangan sosial - ekonomi, inflasi, utang luar negeri dan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah. *Ketiga*, menangkalkan persoalan sistemik, antara lain : terjadinya kebuntuan, ketidak mampuan mencapai keputusan, mudah terpengaruh, “demagogi”, dominasi mereka yang memiliki kepentingan ekonomi. Idealnya hal ini bisa ditangani oleh parpol dengan partisipasi masyarakat sebagai sumber legitimasi.

¹⁰⁰ *Loc.Cit.*, Pramono Anung, tanggal 25 September 2007.

¹⁰¹ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, University of Oklahoma, 1993, hal. 272-274.

Lalu bagaimana agar proses transisi demokrasi mengarah kepada demokrasi yang lebih sehat? menurut Huntington ada tiga alternatif yang bisa ditempuh : Transformasi (*transformation*); Pergantian (*replacement*); Perundingan (*transplacement*). Pada proses transformasi, pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoritarian mempelopori - memainkan peranan yang menentukan guna mengakhiri rezim untuk kemudian mengubahnya menjadi sebuah sistem demokratis. Sedangkan dalam proses *replacement*, demokratisasi terwujud bila oposisi sangat kuat sementara pemerintah sangat lemah, sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Dalam kondisi yang demikian, kelompok pembaharu dalam rezim masih lemah sehingga tidak bisa mengambil peranan yang menentukan. Berbeda dengan proses *transplacement*, dimana demokratisasi merupakan hasil aksi bersama antara pemerintah dan kelompok oposisi. Keseimbangan antara kelompok konservatif dengan pembaharu didalam pemerintahan yang sedemikian rupa hingga memaksa pemerintah agar bersedia berunding, walaupun ia tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim. Sementara di pihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat mengendalikan kelompok radikal yang anti demokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah. Dengan begitu mereka akan memilih cara perundingan.¹⁰² Jadi di reformasi merupakan *transplacement*.

Transisi demokrasi memang memungkinkan bagi tercapainya transformasi nilai yang sedang dikembangkan oleh parpol. Secara lebih jauh, transformasi akan menentukan pola pergantian yang akan terjadi. Tegasnya, jika partai primordial (Islam) yang berhasil melakukan transformasi nilai maka nilai fundamental pun akan mengalami pergeseran, namun bila partai kebangsaan yang berhasil mengembangkan transformasi nilai maka kelestarian jati diri bangsa lebih terjamin. Akan tetapi, realitas bahwa era multi partai tidak memungkinkan bagi hadirnya satu partai dominan telah disadari oleh semua pihak. PDI Perjuangan menyadari bahwa untuk menjadi mayoritas tunggal - lebih dari 50% amat sulit. Oleh karena itu, persepsi terhadap partai lainnya amat menentukan dalam melakukan kerjasama lintas partai seperti diungkapkan oleh Pramono Anung.

Dalam era multi partai tidak mungkin sebuah parpol itu bisa menjadi mayoritas tunggal - lebih dari 50%. Pada era ini mungkin hanya PDI Perjuangan pada tahun 1999 yang mampu menjangkau 34%. Sedangkan ukuran untuk berkoalisi bagi PDI Perjuangan adalah persamaan persepsi dan pandangan terhadap kebangsaan- sehingga kesamaan platform itu menjadi penting. Apakah harus nasionalis dengan nasionalis? Tidak, kami bisa bekerjasama dengan P3, misalnya ketika Ibu – Pak Hamzah Haz. Dimana dasarnya

¹⁰² *Op.Cit.*, Samuel P. Huntington, 1993 : 158 -191.

adalah kesamaan paham kebangsaan sehingga tidak ada keraguan untuk melihat persoalan kebangsaan dan itulah yang menjadi ukuran utama - cara pandang terhadap persoalan negara.¹⁰³

Demikian pula dengan PK Sejahtera, ia memiliki kriteria tertentu untuk berkerjasama dengan partai lain.

“Dalam konteks komunikasi-kerjasama dengan partai Islam, kami bekerja di dua level: Pertama di level ideologis, ada agenda-agenda keumatan yang lebih spesifik, yang itu saya kira kerangka berfikir - kerangka kepentingannya relatif banyak persamaan antara PKS dengan partai-partai Islam yang lain. ... Kedua, komunikasi dan kerjasama pada level taktis - politis, yaitu ketika kami berbicara dengan konsep-konsep dan program-program riil yang dibutuhkan oleh masyarakat, tanpa peduli siapa mereka, tanpa peduli bagaimana mereka. Karena ini satu hal yang sifatnya universal dan ini sangat terbuka untuk kami komunikasikan. Paling tidak, karena secara ideologis kami punya banyak kesamaan maka secara taktis pun kami berharap juga akan lebih memiliki banyak kesamaan. Tapi tentu saja PKS, termasuk yang di DPR ini sangat terbuka untuk berkomunikasi - kerjasama dengan partai-partai atau fraksi lain yang tidak berbasis agama seperti Partai Golkar, PDIP, bahkan berbeda agama sekalipun, dalam tataran politis dan taktis tadi. Memang kalau sudah menyentuh aspek atau level ideologis, tidak terhindarkan ada perbedaan-perbedaan yang tajam.”¹⁰⁴

Persepsi dari masing-masing parpol terhadap partai lain amat penting dalam aspek ketahanan nasional karena turut menentukan pola kerjasama dan konfigurasi politik nasional. Meskipun dalam proses negosiasi bisa terjadi konsensus, tetapi bisa saja tidak demikian - dalam proses negosiasi bisa tidak tercapai konsensus bersama diantara pihak yang bersaing.

Kalau pun perbedaan platform dan metode dari kedua parpol bisa menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional, namun demokrasi dalam jangka panjang bisa menjadi juri yang cukup adil dengan memberikan koreksi terhadap eksistensi semua parpol.¹⁰⁵ Sebab rakyat sebagai sumber legitimasi politik akan memberikan keputusan yang fair terhadap keberadaan parpol untuk mewakili aspirasi mereka. Jadi parpol yang tidak memperoleh dukungan sudah seharusnya menyadari bahwa keberadaan mereka tidak sesuai dengan selera “pasar politik”. Secara lebih singkat dapat dinyatakan bahwa multi partai terbatas ditengah heterogenitisa bangsa dengan kekuatan parpol yang relatif berimbang (baik partai nasionalis maupun agama) bisa memberikan jaminan bekerjanya secara optimal sistem pemerintahan dalam mewujudkan

¹⁰³ *Loc.Cit.*, Pramono Anung W., tanggal 25 September 2007.

¹⁰⁴ *Loc.Cit.*, Mahfudz Sidiq, tanggal 02 Oktober 2007.

¹⁰⁵ Perlu di catat bahwa Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang baru di sahkan oleh DPR RI tetap mengarah kesana walaupun kompromi-kompromi politik amat dominan.

ketahanan nasional. Tentu dengan catatan, bahwa parpol harus betul - betul menjalankan kepentingan rakyat secara luas, sehingga dapat memberikan keamanan dan keadilan dalam melakukan artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Hanya dengan demikian Pancagatra sebagai salah satu fundamen bagi ketahanan nasional bisa dicapai dengan optimal melalui demokrasi – dimana parpol menjadi pilar utamanya.

